

## Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Kearifan Lokal

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 113 pulau, aglomerasi daerah penyangga Jakarta Bodetabekjur. Arah kebijakan pengembangan meliputi tiga hal, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan pariwisata dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Masalahnya mata pencaharian nelayan ditinggalkan generasinya, budaya kemandirian nelayan terkikis dengan budaya penerima bantuan.

Pemberdayaan yang diteliti sebagian nelayan yang memiliki kemandirian dalam menafkahi keluarganya dan tangguh dalam berbagai tantangan akan menjadi rujukan model pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal modal sosial dan modal alam, digerakkan oleh perangkat daerah. Agar profesi nelayan supaya terus ada berkelanjutan. Berakselerasi dengan pengusaha oleh alam yang memproduksi besar-besaran hasil laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, berpotensi menampung ribuan tenaga kerja, solusi dari masalah pengangguran dampak Pandemi Covid-19 dan Revolusi Industri 4.0 serta bonus demografi tahun 2025 sampai dengan 2045. Pisau analisis menggunakan pendapat Todaro and Smith dalam Latopa and Saidu (2015), nilai-nilai penyebab kemandirian yaitu kebebasan menghamba (freedom to servitude), harga diri (self-esteem) dan keberlanjutan (sustainability), berorientasi kepada orang, keterlibatan masyarakat asli adat setempat, serta berkelanjutan. Menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara, Observasi, aplikasi NVivo 12 dan telaahan Dokumen menjadi teknik triangulasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data seluruh hasil penelitian.



Epigraf Komunikata Prima  
Pondok Bumi Permai, Jalan Muli, Blok A3, No. 3, Gertak, Baki,  
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57530  
Telp. +62-81-9251-4550  
Email: epigrafkomunikata1@gmail.com  
www.epigraf.com

ISBN 978-623-5545-30-1

PURNOMO — M. IRWAN TAHIR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL



# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

PURNOMO  
M. IRWAN TAHIR



**Pemberdayaan  
Masyarakat Nelayan  
Berbasis Kearifan Lokal**



**Pemberdayaan Masyarakat Nelayan  
Berbasis Kearifan Lokal**

©2022 oleh Purnomo dan M. Irwan Tahir

Editor: Izzudin Irsam Mujib

Desainer Isi dan Sampul: Sona Purwana

Cetakan I, Januari 2023

ISBN 978-623-5545-30-1

**Diterbitkan oleh**

Epigraf Komunikata Prima

Pondok Baru Permai, Jalan Nuri, Blok A3, No. 9, Gentan, Baki,  
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556

Telp. +62 812-9252-6552

Pos-el: [epigrafkomunikata.id@gmail.com](mailto:epigrafkomunikata.id@gmail.com)

[www.literator.id](http://www.literator.id)

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Prakata .....	xi
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perangkat Daerah .....	2
B. Sejumlah Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	18
C. Fokus Penelitian .....	38
<b>BAB II Pemerintahan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat..</b>	<b>41</b>
A. Makna, Hakikat, dan Fungsi Pemerintahan .....	42
B. Pemerintahan Daerah .....	51
C. Teori Pembangunan Masyarakat .....	56
D. Pembangunan Berkelanjutan.....	59
E. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan.....	63
F. Modal Alam .....	74
G. Modal Sosial.....	76
H. Kearifan Lokal .....	80
<b>BAB III Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	84
B. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	188
C. Nilai-Nilai Penyebab Kemandirian Nelayan .....	232
D. Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Kearifan Lokal .....	288

BAB IV Penutup.....	303
Glosarium .....	311
Daftar Pustaka.....	321
Indeks.....	331
Tentang Penulis.....	337

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Sebaran Referensi menurut Teori Penelitian.....	34
Gambar 1.2	Sebaran Referensi menurut Metode Penelitian...	35
Gambar 1.3	Sebaran Referensi 20 Kata yang Sering Muncul ..	36
Gambar 3.1	Jembatan Cinta Pulau Tidung .....	91
Gambar 3.2	Museum Kerangka Paus Pulau Tidung Kecil .....	92
Gambar 3.3	Posisi Strategis Kepulauan Seribu .....	102
Gambar 3.4	Sekumpulan lumba-lumba melintas di perairan antara Pulau Panggang dan Pulau Karya. ....	103
Gambar 3.5	Tradisi Sambut Nelayan Hajatan Pulang Babang Pulau Pramuka .....	122
Gambar 3.6	Grafik Kasus Aktif Covid-19 di Kepulauan Seribu.	125
Gambar 3.7	Capaian Vaksinasi Tiap Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu per 5 Agustus 2021 .....	126
Gambar 3.8	Gedung Sekolah dan Suasana Belajar di Kelas Sebelum Pandemi .....	129
Gambar 3.9	Spot Wisata Kepulauan Seribu .....	134
Gambar 3.10	Instalasi Produksi Air Bersih BWRO dan SWRO....	136
Gambar 3.11	Pengelolaan Sampah oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup .....	140
Gambar 3.12	Laporan Harian Keberangkatan Kapal dari Pelabuhan Muara Angke.....	142
Gambar 3.14	Masjid Raya Nurul Huda Pulau Tidung.....	147
Gambar 3.15	Jalur Sepeda Pulau Untung Jawa .....	150
Gambar 3.16	Jalur Sepeda di Pulau Pramuka .....	151
Gambar 3.17	Peta Pulau Panggang dan Pulau Pramuka .....	153
Gambar 3.18	Moda Transportasi Kapal Ambulans RSUD .....	154
Gambar 3.19	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu ...	154
Gambar 3.20	Halaman Plaza dan Kantor Kabupaten .....	157
Gambar 3.21	SMAN 69 Jakarta dan Asrama Putri.....	158
Gambar 3.22	Taman Nasional Pulau Pramuka .....	159

Gambar 3.23	Pulau Untung Jawa.....	160
Gambar 3.24	Tempat Wisata Pasir Putih Pulau Untung Jawa ....	162
Gambar 3.25	Dermaga Nelayan Pantai Sakura .....	162
Gambar 3.26	Pohon Sakura Pantai Untung Jawa .....	163
Gambar 3.27	Jembatan Pengantin di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, yang dibuat berbentuk hati mengelilingi pohon pengantin.....	164
Gambar 3.28	Sarana Pendidikan Negeri Pulau Untung Jawa ....	165
Gambar 3.29	Bangunan Kantor Lurah dan Puskesmas.....	166
Gambar 3.30	Pulau Tidung dan Pulau Tidung Kecil (insert perbesaran gambar).....	167
Gambar 3.31	Dermaga Jembatan Cinta Pulau Tidung.....	168
Gambar 3.32	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 61 Jakarta ..	170
Gambar 3.33	Kantor Camat Kepulauan Seribu Selatan, Kantor Lurah Pulau Tidung dan Puskesmas Pulau Tidung.....	171
Gambar 3.34	Pulau Payung (insert perbesaran gambar lokasi hunian).....	172
Gambar 3.35	Peta Pulau Pari dan Pulau Lancang .....	173
Gambar 3.36	Dermaga Timur Pulau Lancang.....	174
Gambar 3.37	Dermaga Pulau Pari.....	175
Gambar 3.38	SDN Pulau Pari 02 dan SMPN 288 Jakarta.....	176
Gambar 3.39	Pusat Penelitian Oseanografi LIPI UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Pulau Pari .....	177
Gambar 3.40	Peta Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.....	178
Gambar 3.41	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.	179
Gambar 3.42	Kantor Camat Kepulauan Seribu Utara .....	180
Gambar 3.43	SPTN II Pulau Harapan .....	180
Gambar 3.44	SDN Pulau Kelapa 02 Pagi.....	181
Gambar 3.45	SMPN 260 Pulau Harapan .....	182
Gambar 3.46	Peta Pulau Kelapa Dua .....	183
Gambar 3.47	Dermaga Kelapa Dua.....	184

Gambar 3.48	SPTN I Wilayah I Balai Taman Nasional Kementerian Lingkungan Hidup.....	185
Gambar 3.49	Peta Pulau Sabira .....	186
Gambar 3.50	Dermaga Pulau Sabira.....	187
Gambar 3.52	Peneggelaman Rumah Ikan (Rumpon).....	190
Gambar 3.53	KUB Penerima Bantuan BPSUN.....	207
Gambar 3.54	Penyerahan Kartu Asuransi Bagi Nelayan .....	208
Gambar 3.55	Panen Rumput Laut .....	209
Gambar 3.56	Bibit Pohon Produktif .....	210
Gambar 3.57	Panen Udang di Pulau Untung Jawa.....	211
Gambar 3.58	Kelompok Jaring Apung .....	212
Gambar 3.59	Docking Kapal Pulau Pramuka .....	214
Gambar 3.60	Selebaran Bazar Along Market.....	215
Gambar 3.61	Pengukuran Pas Kapal.....	216
Gambar 3.62	Pekerjaan yang Selalu Ada dalam Kondisi Apa Pun .....	234
Gambar 3.63	Jejaring Negara dan Bangsa .....	237
Gambar 3.64	Pekerjaan yang Menjadi Cita-Cita .....	243
Gambar 3.65	Pekerjaan yang Mudah Didapatkan .....	245
Gambar 3.66	Pengolahan Data Wawancara Frekuensi Kata.....	246
Gambar 3.67	Analisis Eksistensi Nelayan Kepulauan Seribu .....	248
Gambar 3.68	Matrix Coding Analisis Eksistensi Nelayan Kepulauan Seribu .....	249
Gambar 3.69	Pekerjaan yang Tidak Disukai.....	252
Gambar 3.70	Rapat Koordinasi Pimpinan Kabupaten Awal Bulan Januari 2022.....	260
Gambar 3.71	Fitur Jakpreneur dalam Aplikasi JAKI .....	264
Gambar 3.72	Kapal Nelayan Pulau Sabira .....	269
Gambar 3.73	Lokasi Penjemuran Ikan Asin di Pulau Sabira .....	271
Gambar 3.74	Panen Teri di Bagang Nelayan Pulau Lancang.....	272
Gambar 3.75	Rajungan Hasil Perangkap Bubu Nelayan Pulau Lancang .....	273
Gambar 3.76	Bantuan Bibit Ikan dari Dinas KPKP kepada Kelompok Nelayan Budi Daya Ikan.....	274

Gambar 3.77	Panen Ikan Bandeng UPGK Pulau Pramuka.....	275
Gambar 3.78	Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, Kelurahan Untung Jawa.....	281
Gambar 3.79	Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kepulauan Seribu .....	293
Gambar 3.80	Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Sosial-Rumah Pengasuhan Negara (KS-RPN) .....	300

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Tahun 2018 .....	4
Tabel 1.2	Jenis Pekerjaan Penduduk Kepulauan Seribu .....	8
Tabel 1.3	Data Klasifikasi Nelayan Pesisir Jakarta .....	9
Tabel 1.4	Data Armada Perikanan Tangkap Pesisir Jakarta.....	11
Tabel 1.5	Data Jumlah Nelayan Perikanan Laut menurut Kategori Nelayan Daerah Perairan Pantai di Kepulauan Seribu .....	14
Tabel 3.1	Luas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menurut Kecamatan .....	87
Tabel 3.2	Jumlah Pulau, Nama, dan Luas Daratan Pulau Permukiman menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	88
Tabel 3.3	Jumlah Pulau menurut Kelurahan .....	89
Tabel 3.4	Nama dan Luas Daratan Menurut Pulau di Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.	90
Tabel 3.5	Nama dan Luas Daratan menurut Pulau di Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan .....	93
Tabel 3.6	Nama dan Luas Daratan menurut Pulau di Kelurahan Pulau Untung Jawa .....	94
Tabel 3.7	Nama dan Luas Daratan menurut Pulau di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	95
Tabel 3.8	Nama dan Luas Daratan menurut Pulau di Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.....	97
Tabel 3.9	Nama dan Luas Daratan menurut Pulau di Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara .	98
Tabel 3.10	Data Kependudukan menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Pulau Panggang.....	110
Tabel 3.11	Data Kependudukan menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pulau Kelapa.....	110

Tabel 3.12	Data Kependudukan menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pulau Harapan .....	111
Tabel 3.13	Data Penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pulau Untung Jawa .....	112
Tabel 3.14	Data Penduduk menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pulau Tidung .....	113
Tabel 3.15	Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pulau Pari .....	114
Tabel 3.16	Data Perincian Penyebaran Covid-19 per Pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Update 5 Agustus 2021 Pukul 13.18 .....	124
Tabel 3.18	Sarana dan Prasarana per Pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	128
Tabel 3.19	Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara .....	131
Tabel 3.20	Instalasi Pengolahan Limbah.....	137
Tabel 3.21	Data Hasil Pengawasan/Observasi/Pendataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	143
Tabel 3.22	Data Masjid di Setiap Pulau Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	146
Tabel 3.23	Data Sarana dan Prasarana di Setiap Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu .....	148
Tabel 3.24	Mata Pencaharian Penduduk Kepulauan Seribu.....	189
Tabel 3.25	Program dan Kegiatan Dinas KPKP Tahun 2017 .....	193
Tabel 3.26	Program dan Kegiatan Sudin KPKP 2017 .....	195
Tabel 3.27	Program dan Kegiatan Dinas KPKP Tahun 2018 .....	196
Tabel 3.28	Program dan Kegiatan Suku Dinas KPKP Tahun 2018	198
Tabel 3.29	Program dan Kegiatan Dinas KPKP Tahun 2019 .....	199
Tabel 3.30	Program dan Kegiatan Suku Dinas KPKP Tahun 2019	202
Tabel 3.31	Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2021	218
Tabel 3.32	Program dan Kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020.....	219

Tabel 3.33 Program dan Kegiatan Suku Dinas Parekraf Tahun 2021 .....	219
Tabel 3.34 Program dan Kegiatan Suku Dinas Parekraf Tahun 2020 .....	220
Tabel 3.35 Program dan Kegiatan Sudin PPAPP Tahun 2021 .....	221
Tabel 3.36 Program dan Kegiatan Sudin PPAPP Tahun 2020 .....	222
Tabel 3.37 Program dan Kegiatan Sudin PPAPP Tahun 2019 .....	223
Tabel 3.38 Program dan Kegiatan Suku Dinas PPKUKM Tahun 2021 .....	225
Tabel 3.39 Program dan Kegiatan Suku Dinas PPKUKM Tahun 2020 .....	226
Tabel 3.40 Program dan Kegiatan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Tahun 2021 .....	226
Tabel 3.41 Data Binaan Jakpreneur.....	230
Tabel 3.41 Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per Pulau Hunian.....	253
Tabel 3.42 Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per Pintu Masuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021 .....	254
Tabel 3.43 Produksi Ikan Kapal Nelayan Tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru 2021 .....	278
Tabel 3.44 Bentuk Kolaborasi untuk Berbagai Tingkatan (Lemah/ Kuat) antara Peran Komunitas dan Donor (Pemerintah/Korporasi) .....	288



# Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas kehendak-Nya maka buku ini bisa tersaji di hadapan sidang pembaca sekalian. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis serta dikompilasi dengan hasil pemikiran dan diskusi kami berdua selaku praktisi dan akademisi. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru berkaitan dengan kajian pemberdayaan masyarakat, terkhusus masyarakat pesisir.

Tema tentang pemberdayaan masyarakat pesisir sudah banyak mewarnai khazanah literatur dari beberapa sudut pandang keilmuan. Namun, buku ini memberi perspektif berbeda melalui kajian yang mendalam tentang ketahanan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal turun-temurun dengan segala keterbatasannya mengolah sumber daya kelautan yang melimpah baik permukaan maupun dalam lautnya hingga memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Pada kondisi ini, peran pemerintah dibutuhkan untuk mendukung para nelayan dengan layanan publik berupa terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban, air bersih, listrik, wifi gratis, penanganan sampah dan pembuangan rumah tangga, transportasi, dan lainnya mengikuti perkembangan kebutuhan publik masyarakat nelayan. Semua fenomena seputar pemberdayaan masyarakat pesisir dibahas secara komprehensif dalam buku ini, sehingga buku ini relevan bagi pemerhati kajian pemberdayaan masyarakat.

Buku ini diawali dari pembahasan tentang permasalahan yang terjadi seputar pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Bab I. Kemudian pada Bab II dilanjutkan dengan pembahasan seputar konsep dan teori yang melandasi kajian tentang fungsi pemerintahan, pemerintahan daerah, pembangunan masyarakat, pembangunan berkelanjutan,

pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, modal alam dan modal sosial serta konsep kearifan lokal. Bab IV memberikan uraian tentang gambaran umum Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai lokasi penelitian, terutama kondisi alam dan kondisi sosialnya serta membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, nilai-nilai kemandirian nelayan, serta model pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal dengan modal sosial dan modal alam ditunjang layanan publik oleh perangkat daerah secara sistemik-ekologik-holistik. Hal ini berdampak pada tumbuh dan berkembangnya mata pencaharian pada sektor perikanan, pariwisata, pemerintahan, ekologi secara berkelanjutan. Bab VI memberikan konklusi dan rekomendasi tentang pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terutama pada saat pelaksanaan penelitian lapangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tidak lupa pula terima kasih kami ucapkan kepada keluarga kami yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Akhir kata, semua kelemahan dan kekurangan dalam buku ini murni tanggung jawab penulis. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, kiranya pembaca dapat memberikan saran dan kritik demi perbaikan. Semoga karya sederhana ini dapat sedikit memberikan manfaat, baik kepada penulis dan juga pembaca umumnya. Aamiin.

Jatinangor, Januari 2023

Purnomo

M. Irwan Tahir

BAB I

# Pendahuluan



## **A. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perangkat Daerah**

**K**epulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan wilayah dengan berbagai karakter dan potensi alam. Berbeda dengan wilayah kota administrasi di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil dan terumbu karang yang dibingkai dan dibentuk oleh biota karang, biota koral, dan biota asosiasinya (seperti moluska dan foraminifera) dengan beberapa bagian batuan yang terbentuk dari proses dinamika alam.

Topografi Kepulauan Seribu rata-rata landai (0–15% dengan ketinggian 0–2 meter di atas permukaan air laut). Tipe iklim di 11 pulau permukiman adalah tropika panas dengan suhu maksimum 32,30 °C, suhu minimum 21,6 °C dan suhu rata-rata 27 °C serta kelembapan udara 80%. Demikian juga halnya dengan luas pulau di kisaran 0–50 hektar. Dengan demikian, menurut letak dan beberapa keadaan tersebut, masyarakat Kepulauan Seribu masuk kategori masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, yang kehidupannya bergantung pada hasil laut.

Dari beberapa hasil kajian ilmiah yang menyoroti persoalan nelayan, masyarakat nelayan identik dengan permasalahan yang berkepanjangan dan ketidakberdayaan. Alasan tersebut memunculkan program pemberdayaan dari pemerintah setempat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bentuk kegiatan pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, pembekalan keterampilan, sosialisasi hal baru, sampai pada pemberian bantuan barang maupun modal bersama. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan, ada pendapat yang memiliki sudut pandang berbeda, bahwa untuk mengembangkan masyarakat nelayan tidak selalu mesti berfokus pada peningkatan pendapatan mereka, tetapi juga meningkatkan harga diri nelayan. Pengakuan keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan penting dalam strata sosial di masyarakat agar bermasyarakat lebih manusiawi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Goulet (Imron, 2003):

“Maka mengembangkan masyarakat nelayan bukan saja bermakna meningkatkan pendapatannya, melainkan juga membantu meningkatkan harga diri nelayan. Hal ini penting karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Goulet, mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bukan saja terkait dengan masalah penopang hidup (*life sustenance*), melainkan juga dengan masalah harga diri (*self esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Semua itu dimaksudkan agar orang miskin itu bisa menjadi lebih manusiawi (*in order to be more human*).”

Permasalahan nelayan yang disampaikan oleh Imron (2003) dalam artikel “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan” mengarah pada perlunya artikulasi harga diri nelayan berdasarkan prinsip hidup yang dipilih, kebebasan menghamba/kebebasan melayani/kerelaan bekerja keras, kekuatan diri, kekuatan sosial bersama alam yang menjadi bagian manifestasi kedudukan sejajar dengan pekerja kantor atau lainnya. Menipisnya gap dikotomi kaya-miskin, kasar-halus, atasan-bawahan, pejabat-rakyat jelata, derajat tinggi-rendah, semuanya mengandung maksud untuk mendapati tatanan pada atmosfer kehidupan yang lebih manusiawi. Hal inilah yang menjadi sudut pandang dalam penelitian ini.

Persoalan kemiskinan, yang identik dengan masyarakat nelayan, bukan merupakan masalah signifikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diketahui dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Dalam pergub ini diatur pengelompokan hunian pada tatanan tingkat rukun warga (RW) dengan empat kategori, yaitu berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Kegiatan ini sering disebut penataan RW kumuh padat/kumuh miskin (kupas/kumis) berkelanjutan dan progres yang diharapkan adalah adanya penurunan jumlah RW kupas/kumis setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan**  
**Kawasan Permukiman Terpadu Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota Administrasi	Rukun Warga				Total
		Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	
1.	Kepulauan Seribu	-	-	4	3	7
2.	Jakarta Pusat	1	23	47	27	98
3.	Jakarta Utara	4	21	35	20	80
4.	Jakarta Barat	7	29	41	15	92
5.	Jakarta Selatan	1	14	37	38	90
6.	Jakarta Timur	2	12	41	23	78

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018, dapat diketahui RW kumuh di Kepulauan Seribu ada dalam kategori ringan dan sangat ringan. Dalam hal pencapaian keberhasilan penataan, progresnya diukur dari adanya peningkatan, dari berat menjadi sedang, sedang menjadi ringan, serta ringan menjadi sangat ringan. Pada lima wilayah kota administrasi masih dijumpai progres utuh keseluruhan dari berat sampai dengan sangat ringan. Adapun pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pencapaiannya tinggal penataan dari ringan ke sangat ringan.

Berkaitan dengan kondisi alam Kepulauan Seribu sebagaimana tergambar pada alinea sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengembangan Kepulauan Seribu ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu, Bab II Pembagian Zona dan Rencana Peruntukan, Pasal 2 Ayat (2) kebijaksanaan pokok pengembangan wilayah Kepulauan Seribu ditujukan untuk pengembangan pariwisata;

1. pengembangan kegiatan perikanan dan hasil-hasil laut lainnya; dan
2. pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Peningkatan status kecamatan menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan status kecamatan menjadi kabupaten tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu di antaranya terlihat pada peningkatan lapangan kerja pada instansi pemerintah, Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Kabupaten, pegawai negeri sipil maupun penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU), instansi Kepolisian maupun TNI. Begitu pula standar bangunan sarana dan prasarana pendidikan gedung sekolah, asrama, puskesmas, jalan orang, sama dengan kota metropolitan Jakarta. Kelebihannya, ada sarana penyulingan air laut menjadi air tawar (SWRO) dan air tanah menjadi air tawar (BWRO). Kemudian, dibangun pula pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pulau Sabira. Sementara itu, di sepuluh pulau lainnya pelayanan PLN dilakukan melalui kabel bawah laut. Selain itu, ada pembangunan dermaga dan tanggul pemecah ombak, serta kapal transportasi tersedia makin memadai.

Dalam perkembangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, profesi nelayan makin tersisih. Sebagian besar mendambakan profesi gaji bulanan, bisa bekerja di PJLP, PPSU, guru, KKI, tenaga kesehatan, atau organisasi kelembagaan masyarakat yang mendapat honor APBD. Bagi yang belum masuk, mengharap tahun depan diterima, sedangkan tahun depan bertambah pula usia kerja yang lulus SMA. Karena itu, setiap tahun ada kegaduhan dalam hal penerimaan lapangan kerja tersebut. Hal yang menarik bagi penulis, sebelum berkembang menjadi kabupaten, nelayan adalah mata pencaharian favorit di Kepulauan Seribu. Menjadi nelayan mendapatkan kesejahteraan, tetapi mengapa generasi sekarang meninggalkan profesi nelayan, padahal lapangan kerja nelayan terbuka luas. Luasnya lapangan kerja nelayan dapat menjadi solusi

untuk masalah pengangguran saat bonus demografi yang menjelang terjadi diperkirakan akan berlangsung dari tahun 2025–2045.

Pada masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sistem tatanan sosial secara sporadis dan cepat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpacu dengan informasi penyebaran Covid-19, untuk menyelamatkan warganya dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan WHO, bercermin pada kota-kota awal munculnya Covid-19 di dunia. Semula hal ini sekadar masalah kesehatan. *Testing* dan *tracing* diterapkan pada 15 orang setiap ditemukan kasus aktif. Ketika laporan Dinas Kesehatan menyampaikan lonjakan kasus Covid-19, kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seizin Kementerian Kesehatan RI, memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, pada 10 April sampai dengan 23 April 2020. Dalam PSBB ini diberlakukan larangan seluruh aktivitas berkumpul orang apa pun bentuk dan tujuannya. Kemudian, kasus menurun di beberapa tempat, tetapi muncul klaster baru di beberapa tempat lain. Lalu, diberlakukanlah pembatasan sosial berskala lokal. Ketika keadaan menuju normal, diberlakukan PSBB masa transisi dengan memperhatikan jarak dan kapasitas ruangan 50% dan pada tata nilai masyarakat diberlakukan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak). Pada masa ini diberlakukan tindakan tegas; bagi yang melanggar dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Kemudian, kasus tiba-tiba meningkat, sehingga diberlakukanlah PSBB pengetatan. Situasinya mengulang kembali dari awal. PSBB transisi kembali berlangsung sampai 6 Desember 2020. Akhirnya, dampak pandemi Covid-19 merambah pada semua sektor, termasuk di antaranya sektor usaha/industri tertentu, mulai penutupan sementara sampai bangkrut, sehingga terjadilah pengurangan tenaga kerja. Akhirnya, hal ini berdampak pada berkurangnya penghasilan dalam tingkatan rumah tangga.

Dalam situasi ini, terjadi hal menarik di Kepulauan Seribu. Kasus Covid-19 ada, tetapi cenderung tidak berkembang. Kesehatan dan

kebugaran didapati leluasa bersamaan dengan ketersediaan sumber daya alam melimpah, pantai yang luas, udara segar, sinar matahari dari pagi sampai sore leluasa menyinari, konsumsi ikan segar, dan dalam tatanan sosial diberlakukan protokol kesehatan. Meski daya beli masyarakat menurun, aktivitas nelayan tetap berlangsung seperti biasa. Mereka menjalankan rutinitas melaut mencari rezeki menafkahi keluarga. Inilah hal menariknya. Kehidupan nelayan melaut memenuhi syarat *social distancing* dan berinteraksi langsung dengan anugerah luasnya alam udara segara, terik matahari, dan melimpahnya air yang menjadi solusi dalam pencegahan penularan Covid-19. Demikianlah keseharian nelayan Kepulauan Seribu.

Nelayan sebagai salah satu mata pencaharian warga Kepulauan Seribu tetap berlangsung pada masa pandemi Covid-19. Mereka tetap memperoleh hasil tangkapan ikan sebagaimana musimnya macam-macam ikan. Pengeluaran yang mereka keluarkan adalah modal panen dalam industri laut Ibu Pertiwi. Kelautan memproduksi perikanan dan hasil-hasil laut lainnya untuk rezeki kehidupan serta pesona alam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan.

Bagi sebagian masyarakat Kepulauan Seribu bertahan sebagai nelayan adalah pilihan hidup, karena disinilah keahlian mereka secara turun temurun, bertaruh nyawa mengarungi lautan, kepada Sang Pencipta memohon keselamatan, niatkan ibadah setiap kali meninggalkan rumah, semata-mata menghamba kepada Allah Subhanahuwataala, Tuhan Semesta Alam Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sampai kembali pulang ke rumah membawa rezeki, berapa pun hasilnya. Hal inilah yang menarik penulis, yaitu kesanggupan sebagian masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu sementara sebagian lainnya beralih profesi keluar dari dunia nelayan yang justru rentan terjadi PHK pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut paralel dengan Era Revolusi Industri 4.0.

Masyarakat nelayan lekat dengan stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, justru dalam masa pandemi Covid-19 maupun Revolusi Industri 4.0, mereka bertahan. Dampak

Revolusi Industri 4.0 yang diiringi kemajuan teknologi digitalisasi informasi, di antaranya adalah disrupsi, banyak tenaga manusia tergantikan dengan *platform* digital berbasis internet (*internet of things*). Perusahaan konvensional yang tidak siap dengan perubahan ini melakukan pengurangan tenaga kerja perusahaannya, bahkan sampai gulung tikar.

Dampak pengurangan tenaga kerja ini tidak terjadi pada dunia kerja nelayan. Mereka dapat menunjukkan eksistensi profesi nelayan di tengah keluhan-keluhan umumnya masyarakat. Ada ketahanan pangan dan lapangan kerja yang sangat luas bagi mereka yang mengusahakannya. Lautan yang sangat luas dengan sumber daya perikanannya dan juga segala macam sumber daya untuk kehidupan manusia banyak memberikan harapan hidup dan kebahagiaan, dan nyata hal itu mereka dapatkan. Inilah pentingnya sumber daya alam dan cara-cara memanfaatkannya secara turun-temurun menjadi pokok pikiran dalam pengembangan masyarakat, yang membentuk kemandirian hidup untuk mendapatkan kebahagiaan bersama keluarganya. Kemandirian diperoleh melalui modal alam dan modal sosial sebagai bentuk kearifan lokal yang sudah menjadi nilai-nilai untuk keberlangsungan hidup hingga saat ini. Berikut disajikan data sebaran nelayan dan jenis pekerjaan masyarakat Kepulauan Seribu pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jenis Pekerjaan Penduduk Kepulauan Seribu**

No.	Kelurahan/ Kecamatan	Nelayan	Pedagang	Pegawai/ TNI/Polri	DII.	Jumlah
1	Pulau Tidung	863	97	241	964	2.165
2	Pulau Untung Jawa	275	15	58	507	855
3	Pulau Pari	545	17	36	573	1.171
Kepulauan Seribu Selatan		1.683	129	335	2.044	4.191
1	Pulau Panggang	2.796	47	219	778	3.840
2	Pulau Kelapa	2.269	262	181	1.024	3.736

3	Pulau Harapan	477	62	186	393	1.108
	Kepulauan Seribu Utara	5.542	361	586	2.195	8.684
	<b>Kepulauan Seribu</b>	<b>7.225</b>	<b>490</b>	<b>921</b>	<b>4.239</b>	<b>12.875</b>

Sumber: Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta 2020

Pada Tabel 1.2 terlihat nelayan merupakan mata pencaharian yang dominan digeluti oleh masyarakat Kepulauan Seribu. Sumber daya perikanan dan kelautan tersedia melimpah di Kepulauan Seribu dan manusia tinggal mengusahakan panennya, tanpa menabur benih, mencari pakan, memeliharanya dari kecil sampai besar, mengganti air kolam, menjaga dari serangan ikan lain, dan sebagainya. Alamlah yang mengusahakan itu semua dan masyarakat nelayan tinggal mememanennya. Modal finansial yang dikeluarkan nelayan semata-mata untuk modal panen ikan. Hal ini menarik bagi peneliti, bahwa faktor utama keberlangsungan hidup nelayan adalah dari usaha alam dengan modal alam. Modal finansial adalah modal pilihan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan. Dalam hal ini berlaku kaidah berbanding lurus: makin banyak modal finansial, makin banyak hasilnya. Inilah potensi besar yang dimiliki Kepulauan Seribu, yang bisa menampung ribuan tenaga kerja dalam perusahaan alam raya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.

**Tabel 1.3**  
**Data Klasifikasi Nelayan Pesisir Jakarta**

Tahun	Nelayan Penetap (Orang)			Nelayan Pendatang (Orang)			Jumlah Nelayan (Orang)		
	Pemilik	Pekerja	Jumlah	Pemilik	Pekerja	Jumlah	Pemilik	Pekerja	Jumlah
2006	2.826	10.690	13.516	1.287	6.191	7.478	4.113	16.881	20.944
2007	2.441	9.546	11.987	1.662	5.545	7.207	4.103	15.091	19.194
2008	1.060	9.358	10.418	1.708	8.089	9.797	2.768	17.447	20.215
2009	1.123	9.145	10.268	1.243	7.436	8.679	2.366	16.581	18.947
2010	1.326	10.199	11.525	1.276	6.196	7.472	2.602	16.395	18.997

Sumber: Data Potensi Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Jakarta Tahun 2020

Pada Tabel 1.3 terlihat data nelayan penetap dari 2006 sampai di tahun 2010 yang mengalami penurunan signifikan 50% lebih. Meski tiap tahun ada dinamika fluktuasi naik turun, namun cenderung menurun. Adapun pada data nelayan pendatang terjadi dinamika fluktuasi naik turun, tetapi cenderung naik. Hal ini menunjukkan Kepulauan Seribu diminati nelayan pendatang untuk ikut menyambung hidup di perairannya. Intervensi pemerintah selama ini kaitannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu. Dalam hal ini Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP)—Unit Kerja Perangkat Daerah di Kepulauan Seribu adalah Suku Dinas KPKP—di antaranya telah membentuk kelompok-kelompok nelayan berikut.

1. Poklasar, yaitu Kelompok Pengolah Hasil Perikanan;
2. Pokdakan, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan.
3. Kelompok Usaha Bersama untuk para nelayan mendapatkan bantuan modal usaha.
4. Pokmaswas, yaitu Kelompok Pengawas Masyarakat, adalah kelompok nelayan yang menjadi mitra KPKP mengawasi sumber daya ikan, memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran di perairan Kepulauan Seribu, dalam penangkapan ikan maupun perusakan karang. Contohnya, pada pelanggaran kapal SINOC yang merusak terumbu karang di Pulau Pari, kerugian dihitung sekitar RP85 juta, tetapi SINOC hanya mengakui Rp35 juta yang ditransfer kepada Pokmaswas. Biaya itu digunakan untuk rehabilitasi terumbu karang.
5. Pok DPL-BM, yaitu Kelompok Nelayan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Kelompok ini membantu dalam sosialisasi dan turut mengamankan pemanfaatan Laut Kepulauan Seribu sesuai dengan zonasinya. Perairan Kepulauan Seribu dibagi ke dalam beberapa zona, di antaranya ada zona inti dan zona penyangga. Di kedua zona tersebut tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan. Berikutnya, ada zona pemanfaatan. Pada zona ini boleh dilakukan penangkapan ikan oleh nelayan dan bentuk pemanfaatan lainnya.

Kelompok-kelompok ini menjadi mitra dan binaan Suku Dinas KPKP dalam mengaplikasikan program-program peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selain pembentukan kelompok-kelompok tersebut, dilakukan pembangunan fasilitas penunjang aktivitas nelayan, antara lain sebagai berikut.

1. Konservasi transplantasi terumbu karang.
2. *Fish shelter*, yaitu rumah ikan buatan dari beton kubus bertulang, yang ditenggelamkan di dasar laut. Fungsinya sebagai rumpon atau terumbu karang buatan untuk menggantikan terumbu karang yang rusak. *Fish shelter* digunakan ikan sebagai “rumah baru” untuk kembali menemukan habitatnya. Penempatan *fish shelter* tersebut dilakukan di kedalaman laut 25–30 meter di sekitar Pulau Semak Daun.
3. *Docking* kapal nelayan.
4. Along Market, dengan kegiatan pemasaran *online* hasil perikanan dan makanan olahan hasil laut dan menampung souvenir. Sifatnya, pola pemasaran produk nelayan terpenuhi pada Along Market ini. Di sini disediakan *freezer* yang berfungsi menampung ikan hasil tangkapan nelayan sambil menunggu dipasarkan.

Selanjutnya, akan disajikan data armada perikanan tangkap di perairan Jakarta, sebagaimana pada tabel 1.4. sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data Armada Perikanan Tangkap Pesisir Jakarta**

Tahun	Kapal Motor GT						Jumlah Armada (Unit)
	0–5 GT (Unit)	5–10 GT (Unit)	10–20 GT (Unit)	20–30 GT (Unit)	30–50 GT (Unit)	> 50 GT (Unit)	
2006	460	1.209	554	379	39	635	4.523
2007	430	1.276	659	354	34	760	4.609
2008	460	1.858	430	596	51	564	3.959

2009	435	1.427	210	485	108	450	3.115
2010	535	1.721	247	280	68	310	3.161

Sumber: Data Potensi Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Jakarta

Tabel 1.4. menunjukkan varian armada perikanan tangkap di perairan Jakarta. Jumlah kapal kapasitas 10 GT ke atas setiap tahunnya cenderung makin menurun. Sementara itu, kapal kapasitas mesin 10 GT ke bawah cenderung naik. Secara totalitas dari tahun ke tahun ada penurunan. Meskipun demikian, pengadaan kapal untuk nelayan sebagai bantuan untuk kelompok nelayan pernah dilakukan oleh Dinas KPKP.

Upaya Dinas KPKP untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui program bantuan dan pendampingan kepada nelayan masih belum terlihat membawa perubahan. Misalnya, program bantuan Kelompok Jaring Apung (KJA) dalam rangka mengatasi masalah yang dikeluhkan sebagian nelayan, yaitu “ikan pesisir berkurang, area penangkapan makin jauh, makin jauh makin besar modal, sedangkan hasil tidak seberapa”. Untuk mengatasinya, maka KJA-lah solusinya, dengan program pemberdayaan nelayan dari Dinas KPKP untuk nelayan melalui pelatihan budi daya ikan menggunakan keramba jaring apung. Program ini mentransformasikan cara mendapatkan ikan, dari nelayan tangkap ke nelayan budi daya. Harapannya, program tersebut akan menjadi model baru dalam produksi ikan yaitu budi daya. Nyatanya, program KJA masih belum berhasil, meskipun telah dilakukan pendampingan. Berbagai macam alasan dikaitkan dengan kondisi alam. Ada atau tidak ada program, memang demikianlah keadaannya, nelayan lebih menggeluti kesehariannya sebagai nelayan tangkap. Karena itu, dimaklumi jika beberapa keluhan sebagian nelayan yang tersebar luas bersambut dengan pendapat beberapa pakar riset yang menjabarkan permasalahan nelayan ini dalam sudut pandang kemiskinan. Riset mereka menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat nelayan tetap dalam stigma masyarakat miskin, pekerja keras, bertaruh nyawa di lautan,

berpenghasilan minim, pendidikan minim, lemah daya saing, dan penuh penderitaan sehingga memantik rasa kemanusiaan, iba, dan belas kasihan. Dampaknya, profesi nelayan makin tidak menarik dan ditinggalkan generasinya. Padahal, tidak semua nelayan mengeluh, sebagaimana hasil penelitian dan pengamatan terhadap apa yang terlihat pada kehidupan apa adanya di Kepulauan Seribu. Hal ini menambah kasus menarik bagi kami untuk meneliti lebih lanjut, bahwa pemerintah melalui Dinas KPKP memberikan solusi untuk masalah “makin berkurangnya ikan-ikan pesisir dan akibatnya pencarian ikan makin jauh dan makin besar biayanya” dengan program KJA, tetapi diabaikan oleh nelayan karena mereka lebih memilih tradisi yang didapat secara turun-temurun, yaitu nelayan tangkap, sementara bagi beberapa orang nelayan hal itu menjadi keluhan. Artinya, faktor alam masih mumpuni dalam membentuk kemandirian nelayan bagi mereka yang pandai mengusahakannya.

Beberapa permasalahan nelayan yang belum mendapatkan solusi, menjadi tantangan bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Menjadi nelayan masih belum dianggap aman atau belum menjanjikan bisa memberikan kesejahteraan, sehingga makin hari profesi nelayan makin ditinggalkan untuk beralih ke profesi yang lain. Hal ini akan berdampak profesi nelayan makin langka, meskipun tidak ada PHK bagi nelayan. Di sisi lain, fenomena hobi memancing untuk mengisi waktu luang makin hari makin berkembang dan makin banyak. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa hasil laut atau sumber daya alam masih memberikan harapan untuk kelangsungan hidup daripada menganggur. Anomali justru terjadi pada keluarga nelayan sendiri, yang mengharap anak mereka jangan sampai menjadi nelayan. Di sinilah perlunya pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengubah tantangan menjadi peluang, agar profesi nelayan tetap ada dan berkelanjutan. Nelayan sukses dapat menjadi model bagi rekan-rekan nelayan lainnya yang masih berkubang dengan masalah dan keluh kesah.

Penurunan jumlah nelayan sebagaimana yang terdapat pada tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Jumlah Nelayan Perikanan Laut menurut Kategori Nelayan**  
**Daerah Perairan Pantai di Kepulauan Seribu**

Tahun	Kategori Nelayan								
	Jumlah Total			Nelayan Penetap			Nelayan Pendatang		
	Jumlah	Pemilik	Pekerja	Jumlah	Pemilik	Pekerja	Jumlah	Pemilik	Pekerja
2017	3.554	1.380	2.174	3.554	1.380	2.174	-	-	-
2018	4.720	1.180	3.540	4.720	1.180	3.540	-	-	-
2019	2.024	821	1.203	2.024	821	1.203	-	-	-

Sumber: Data Statistik Perikanan Tangkap 2017, 2018, dan 2019

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan di Kepulauan Seribu dari tahun 2017 sejumlah 3.554 nelayan menjadi 2.024 nelayan pada tahun 2019, atau turun 43%. Pada tahun 2017 terdapat 1.380 nelayan pemilik kapal dan pada tahun 2018 menjadi 1.180 nelayan atau turun 14%. Sebaliknya, nelayan pekerja pada tahun 2017 berjumlah 2.174 orang dan menjadi 3.540 orang pada tahun 2018, atau dengan kata lain terdapat peningkatan 1.366 nelayan pekerja atau naik 62,8%. Pengaruh hobi memancing yang terus ramai dipublikasikan juga tampak, sehingga di Kepulauan Seribu pun banyak pemancing baru. Namun, pada tahun berikutnya kembali ada penurunan jumlah nelayan pekerja. Profesi nelayan terancam punah, tetapi masih mempunyai potensi dinamis bisa bertambah sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan potensi profesi nelayan tersebut dan sejalan dengan arah kebijakan pengembangan Kepulauan Seribu, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, dan Rencana Strategis Pembangunan Kepulauan Seribu, yaitu peningkatan kualitas kehidupan nelayan, meningkatkan pariwisata dan pengembangan sumber daya alam hayati dan ekosistem lainnya, Kepulauan Seribu mempunyai

potensi dan arah pengembangan wilayah yang sudah jelas. Akan tetapi, untuk merealisasikannya, masyarakat Kepulauan Seribu menghadapi berbagai tantangan atau hambatan yang dapat datang dari masyarakat asli Kepulauan Seribu sendiri atau dari masyarakat di luar Kepulauan Seribu atau dari alam.

Untuk mengubah tantangan atau hambatan tersebut menjadi potensi pengembangan yang menguntungkan, diperlukan kemauan masyarakat Kepulauan Seribu sendiri untuk mengupayakannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Seribu menjadi penting untuk dibahas.

Terdapat beberapa fenomena dan fakta masalah yang menjadi kesenjangan/gap antara *Das Sollen* dan *Das Sein* antara lain sebagai berikut.

1. *Das Sollen*, pemerintah memberikan pelatihan pembudidayaan ikan melalui kelompok budi daya ikan. Setiap tahun, dana dianggarkan untuk pemberdayaan nelayan sebagai solusi untuk permasalahan kurangnya ikan di lautan dengan tujuan mengembalikan atau bahkan meningkatkan hasil produksi ikan. *Das Sein*, kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut belum memberikan efek peningkatan produksi ikan oleh kelompok nelayan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fokus pemerintah yang hanya tertuju pada pemberian pelatihan untuk beberapa orang dalam bentuk kelompok dengan bantuan keramba, benih, dan pakan ikan, sebagaimana yang ditentukan dalam target dan jadwal pelaksanaan anggaran, bukan pada perhitungan efisiensi bilamana dilakukan oleh nelayan sendiri. Kegiatan budi daya tersebut oleh nelayan kerap dibandingkan dengan cara yang selama ini mereka tekuni yang bisa langsung panen ikan, yakni menangkap ikan di laut.
2. *Das Sollen*, pemerintah menetapkan upah minimum regional yang dijadikan standar pemberian upah/gaji kepada penyedia lapangan kerja. *Das Sein*, beberapa nelayan maupun anggota

keluarganya berpindah profesi bekerja di pemerintahan terkait peningkatan perekrutan PJLP PPSU, tenaga bantu pengajar sekolah, tenaga kesehatan, tenaga sosial, dan pekerja kantor ataupun jasa, meskipun banyak pekerja kantor terkena PHK sebagai dampak Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19.

3. *Das Sollen*, kebijakan pemerintah memberikan proteksi kepada masyarakat nelayan dengan terus mengupayakan kebijakan kesetaraan harga sembako, kemudahan mendapatkan BBM, peningkatan layanan transportasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nelayan Kepulauan Seribu, bantuan alat, pelatihan peningkatan keterampilan tertentu atau pembinaan kelompok nelayan. *Das Sein*, di sisi lain, perlu diperhatikan pentingnya akhlak yang baik, landasan iman dan takwa, serta kekuatan mental spiritual nelayan saat mengarungi lautan untuk menafkahi keluarga secara layak dengan bermodal sosial kearifan lokal yang didapatkan secara turun-temurun dan ketersediaan sumber daya alam, serta kekuatan doa kepada Sang Pencipta yang akan mengantarkan kesuksesan mereka sebagai kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam hal ini nelayan memiliki kemandirian bersama alam.

Berdasarkan penelitian awal tentang pemberdayaan masyarakat Kepulauan Seribu, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pengakuan bahwa profesi nelayan memiliki kesetaraan dengan profesi lainnya dan bahkan ada peran strategis nelayan dalam memenuhi kebutuhan akan protein ikan.
2. Mereka belum bisa melakukan budi daya ikan secara mandiri, sebagaimana yang diharapkan Sudin KPKP ketika memberikan bantuan keramba jaring apung (KJA) kepada para nelayan.
3. Kurangnya penanganan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga belum memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat nelayan Kepulauan Seribu.

4. Kurangnya dukungan pemasaran hasil panen dan tangkapan ikan nelayan sehingga akhirnya dijual kepada *pelele* (tengkulak ikan) dengan harga lokal. Padahal, hasil panen tersebut memiliki harga bagus di daratan Kota Jakarta.
5. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi penumpang dan barang, untuk kelancaran perputaran perekonomian.
6. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat nelayan Kepulauan Seribu, di antaranya perahu masih berukuran GT rendah sehingga kalah bersaing dengan kapal besar yang memiliki peralatan yang lebih canggih.
7. Stigma negatif bahwa masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, meskipun lautan memberikan harapan luasnya lapangan pekerjaan.
8. Kurang diminatinya profesi nelayan. Pengembangan Kepulauan Seribu ke arah peningkatan kegiatan pariwisata berpeluang membuka lapangan kerja baru pada sektor yang mendukung kegiatan pariwisata, tetapi di sisi lain profesi nelayan makin ditinggalkan ketika situasi dunia nelayan belum berubah. Padahal, kebutuhan terhadap ikan adalah *given* untuk keberlangsungan kehidupan guna mendukung ketahanan pangan 12 juta penduduk Jakarta. Potensi kekayaan laut yang besar seharusnya diperkuat terlebih dahulu dengan menciptakan ribuan tenaga kerja sebagai pokok utamanya, karena sektor ini tidak terpengaruh oleh dominasi global, termasuk pandemi Covid-19.
9. Pemberdayaan masyarakat nelayan belum mencapai hasil.
10. Kurangnya kesadaran para pemanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang terus berkelanjutan.
11. Berkurangnya lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 bersamaan dengan Revolusi Industri 4.0, Diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berlanjut PSBB

berskala mikro hingga pelaksanaan pembatasan kegiatan mikro masyarakat dan akhirnya mikro *lockdown* membuat mata pencaharian masyarakat nelayan yang bergantung pada sektor pariwisata mati suri.

Akhirnya, peluang yang seharusnya masih besar yaitu, sektor perikanan dan pengusahaan hasil sumber daya kelautan, yaitu menangkap ikan, budi daya, distributor, serta perdagangan *online* ikan segar dan makanan olahan kembali dilirik. Namun, apakah daya, keahlian nelayan ke arah tersebut masih minim dan akses mereka terbatas, sehingga perlu pemberdayaan di bidang ini.

Dalam identifikasi masalah ini tergambar masalah-masalah yang dihadapi nelayan, yang terus berlarut-larut. Adapun intervensi pemerintah melalui Suku Dinas KPKP untuk pemberdayaan, meskipun ada program kerjanya, masih dalam terminologi proyek, terbatas oleh waktu, biaya, dan tempat, sehingga masih belum menjadi solusi untuk persoalan nelayan. Bahkan, menurut data statistik pada tabel 1.5, berkurangnya jumlah nelayan terjadi setiap tahun. Sementara itu, di sektor lain terjadi pengurangan tenaga kerja. Karena itu, terjadi gap antara luasnya lapangan kerja pada dunia nelayan dan minimnya minat generasi angkatan kerja sebagai nelayan, karena mereka lebih memilih melamar pekerjaan di tempat lain atau menganggur.

## **B. Sejumlah Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat**

Kajian mengenai kearifan lokal dalam keberlangsungan kehidupan yang manusiawi, ekologi, dan berkelanjutan makin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa tujuan akhir hidup adalah kebahagiaan. Pembangunan yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor kemanusiaan serta lingkungan bergeser berorientasi pada orang, nilai-nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan kelestarian alam. Kajian terhadap

hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dalam mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang dibahas sebagaimana akan disampaikan pada alinea berikut.

Kongprasertamorn (2007) melakukan studi tentang penggunaan metode penelitian dan pengembangan masyarakat untuk memasyarakatkan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan, serta pengembangan masyarakat di Tambon Bangkhunsai, Provinsi Phetchaburi, Thailand. Melalui cara ini, dapat saja dilakukan penelaahan oleh masyarakat sendiri mengenai kearifan lokal untuk terus dikembangkan karena terbukti membangun kemandirin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian dan pengembangan masyarakat dapat merangsang kearifan lokal untuk melindungi lingkungan dan mengembangkan masyarakat dengan sejumlah cara. Secara khusus, para nelayan setempat menggunakan kearifan lokal mereka untuk mengumpulkan kerang-kerangan. Mereka mampu membuat perlengkapan sendiri sedemikian rupa sehingga tidak merusak sumber daya alam dan memastikan pelestarian sumber daya alam untuk waktu yang lama. Kearifan lokal juga digunakan dalam pembentukan proyek pengembangan masyarakat, seperti kelompok ekowisata dan kelompok makanan olahan. Diperkirakan bahwa proyek-proyek ini akan mengarah pada manajemen sumber daya yang berkelanjutan.

Penelitian bertema kearifan lokal berikutnya disampaikan oleh Syaparuddin (2018), yang melakukan penelitian dan bertujuan merevitalisasi nilai ekonomi kearifan lokal Bugis menjadi paradigma dan model ekonomi lokal untuk mengembangkan ekonomi rakyat di daerah perdesaan di Sulawesi Selatan, Indonesia. Penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif dan budaya, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis konten dan analisis antarteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Bugis yang mengekspresikan nilai ekonomi disebut *reso* (motivasi berprestasi). Nilai-nilai ekonomi yang dapat dinyatakan dari istilah *reso* adalah tauhid (keesaan Tuhan), keberanian, kerja keras,

independen, menghormati waktu, serta etika dan moral. Paradigma yang dapat mengakomodasi nilai-nilai ini adalah paradigma humanis; maka paradigma ini direkonstruksi menjadi paradigma baru, yang disebut “Bugis Humanis”, karena mengarah pada pandangan subjektif yang didasarkan pada kesadaran manusia, dan lebih menekankan nilai-nilai manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, model ekonomi lokal yang cocok untuk dikembangkan dari paradigma “Bugis Humanis” ini adalah pembangunan manusia dan pertumbuhan dengan ekuitas.

Bachrudin *et al.* (2018) melakukan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal dan menemukan faktor pendorong dan hambatannya, terutama di daerah pesisir Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari pemerintah, tokoh masyarakat Sendang Biru, dan perwakilan masyarakat. Hasil studi didasarkan pada evaluasi pemberdayaan Fujikake, yaitu masyarakat di Desa Tambakrejo memiliki kesadaran yang tinggi yang terbentuk dari keberadaan kearifan lokal dan kebijakan pemerintah sehingga pemberdayaan masyarakat dibuat yang berdampak pada banyak aspek untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, ditemukan juga bahwa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemiskinan, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya aspirasi sehingga tidak optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Diharto *et al.* (2018) melakukan penelitian untuk menganalisis peran pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam pengelolaan ekowisata menggunakan media *online*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengandalkan manajer ekowisata sebagai partisipan yang terlibat dalam penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara intensif menggunakan wawancara

mendalam, periksa silang bidang data dengan data sekunder, dan foto-foto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat berbasis kearifan lokal menggunakan media *online* memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan ekowisata dalam rangka meningkatkan wisatawan lokal dan mancanegara.

Salahuddin *et al.* (2018) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pembangunan, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung kearifan lokal dalam pembangunan serta menggambarkan dan menganalisis penggunaan modal sosial dalam pengembangan Desa Leupung Baleu di Distrik Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kearifan lokal dalam pembangunan Desa Leupung Baleu, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, mencakup kolaborasi antarwarga yang telah berjalan baik dari generasi ke generasi, serta partisipasi yang kuat dalam pembangunan desa, serta selalu memprioritaskan musyawarah, terutama dalam kegiatan desa sebagai bagian dari kearifan lokal. Proses pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat dilakukan melalui kerja sama, partisipasi yang digunakan sebagai kebiasaan yang dapat menghasilkan kepercayaan yang tinggi di masyarakat, dan semangat untuk beramal dalam melakukan pembangunan dan berbagai kegiatan masyarakat serta rasa kesukarelaan yang membangkitkan diri sendiri dengan mengandalkan keterlibatan sipil atau membangun partisipasi yang kuat dan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.

Ilhami dan Riandi (2018) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa masyarakat Minangkabau adalah kelompok etnis mayoritas yang tinggal di Provinsi Sumatra Barat. Kita dapat menemukan bahwa kearifan lokal di provinsi ini terkait dengan pelestarian lingkungan seperti ikan larangan. Hal itu adalah bagian dari sungai yang dilarang untuk kegiatan memancing dalam batas dan rentang waktu tertentu. Para peneliti tertarik untuk

menemukannya yang terletak di Desa Pandam Gadang, Provinsi Sumatra Barat. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi kearifan lokal ikan larangan yang terletak di Desa Pandam Gadang dan menganalisis nilai-nilai konservasi yang terkandung di dalamnya. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Responden yang terlibat secara sengaja dalam penelitian ini adalah penatua dan orang-orang di komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat membuat bagian dari sungai sebagai ikan larangan dibagi menjadi tiga zona dan daerah tersebut memiliki nilai konservasi seperti perlindungan, pelestarian, dan penggunaan berkelanjutan.

Humaida *et al.* (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kearifan lokal di beberapa komunitas lokal di Indonesia digunakan sebagai dasar untuk mengelola lingkungan mereka. Dibandingkan dengan kebijakan modern, penilaian tradisional lebih sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus penelitian ini pada studi literatur tentang aspek ekologis kearifan lokal masyarakat Kalimantan Selatan, seperti sistem pertanian, sistem irigasi, masyarakat sungai, rumah tradisional, dan nilai-nilai filosofis. Meskipun produktivitasnya lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan teknologi modern, kesimpulannya, kearifan lokal Kalimantan Selatan dalam aspek ekologi menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan alamnya. Kebutuhan akan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumerisme seiring kemajuan teknologi modern berikutan persaingan sosial ekonomi menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan terkait dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Jufrida *et al.* (2018) melakukan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan mengidentifikasi konsep sains yang terkandung dalam tangkul dan memetakan kompetensi dasar sains di SMP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat Danau Sipin dan pakar pendidikan

sains. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan model analisis Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi, tampilan, dan verifikasi). Uji validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Tangkul adalah alat tangkap tradisional di Danau Sipin berupa jaring perangkap yang digantung menggunakan bambu. Mekanisme kerja tangkul menggunakan prinsip mesin sederhana, yaitu jaring sebagai beban, tiang sebagai penopang, serta bambu sebagai lengan kekuatan dan lengan beban. Pada saat mengangkat jala, nelayan menarik tenaga dengan kekuatan otot lebih kecil daripada beban. Hal ini menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia.

Lisdiyono (2017) melakukan penelitian dan berupaya menganalisis bagaimana cara mempertahankan kekuatan kearifan lokal dalam upaya melestarikan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kearifan lokal tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan memengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kekuatan pengetahuan lokal penting untuk dilestarikan dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan juga untuk melestarikan lingkungan.

Savira dan Tasrin (2017) bermaksud mengidentifikasi (1) nilai-nilai lokal apa yang berkontribusi positif terhadap inovasi dan perannya sebagai instrumen untuk menginternalisasi inovasi; (2) strategi apa yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat, untuk memobilisasi sumber daya, dan untuk menyesuaikan setiap elemen yang relevan untuk inovasi yang prorakyat dan pemangku kepentingan; (3) bagaimana koordinasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam inovasi. Dengan menggunakan dan menginternalisasi nilai-nilai lokal, pemerintah

daerah Kota Denpasar berhasil menciptakan inovasi layanan publik yang bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan kontekstual.

Sungkharat *et al.* (2010), mempelajari perkembangan proses produksi dan budaya masyarakat di Songkhla Lake Basin di Thailand selatan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan melakukan wawancara mendalam dengan 25 tokoh masyarakat setempat di 25 komunitas di sekitar danau. Hasil studi mengungkapkan bahwa konsep budaya masyarakat dikembangkan melalui pemimpin masyarakat setempat pada proses produksi pertanian yang didasarkan pada konsep swasembada dan kemandirian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perkembangan tersebut telah menyebabkan penurunan penggunaan teknologi oleh penduduk dan mereka kembali ke penggunaan tenaga kerja serta mengurangi penggunaan pupuk kimia dan insektisida. Orang-orang telah kembali menggunakan bahan herbal untuk menyembuhkan penyakit pada manusia dan hewan, serta membantu orang menghemat biaya produksi dan mengurangi polusi.

Mungmachon (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis sekolah mengabaikan pentingnya informasi dan kecerdasan di sekitar. Dalam periode globalisasi ini, peningkatan berpusat pada pengembangan keuangan. Alasan penulisan ini adalah untuk melihat informasi lingkungan dan kearifan lokal dengan isu-isu yang muncul karena perbaikan. Konsekuensi dari eksplorasi ini adalah individu akan tersesat akibat dampak yang masuk dan kemudian menyebar secara lokal. Dampak-dampak ini menyebabkan berbagai masalah alam dan sosial yang tak kenal ampun, termasuk kurangnya informasi adat dan kecerdasan. Globalisasi telah tiba dan dampak negatif dirasakan. Makalah ini menyimpulkan bahwa banyak komunitas saat ini sedang mempelajari masalah mereka, menemukan solusi, dan menjadi kuat kembali. Mereka memulainya dengan secara kolektif mempelajari masalah mereka, memulihkan kearifan dan pengetahuan tradisional yang tersisa, dan mengintegrasikan

pengetahuan baru. Masalah diselesaikan dan pengembangan lebih lanjut disesuaikan. Komunitas-komunitas ini mewakili kekayaan serta memiliki dampak lingkungan dan sosial yang positif.

Dahliani *et al.* (2015) melakukan penelitian dengan mengarahkan pengujian untuk mengevaluasi kecerdasan lingkungan dalam iklim palsu di era globalisasi. Teknik yang digunakan dalam kajian ini adalah strategi keterlibatan subjektif melalui studi penulisan yang diidentifikasi dengan *setting* wawasan lingkungan. Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa wawasan terdekat tentang iklim pemalsuan di masa globalisasi telah berubah dengan kemajuan inovasi dan korespondensi. Perubahan terjadi pada contoh komponen ruangan dan bangunan, tetapi signifikansi yang terkandung dalam struktur sebagai jenis wawasan terdekat tetap dipertahankan. Dalam era globalisasi, kombinasi sosial akan terjadi. Untuk situasi ini, kecerdasan lingkungan dapat menyesuaikan inovasi dengan memikirkan orang terdekat, lingkungan, dan kondisi normal dalam iklim buatan.

Ghoni (2016) dalam artikelnya memberikan ikhtisar konsep-konsep penting kegiatan dan kondisi di lingkungan sekitar yang secara sosiologis berkaitan dengan analisis konten kualitatif. Komunitas yang sedang berkembang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Penggunaan teknologi dan jargon modernitas telah menghantui masyarakat. Padahal, perkembangan yang ada tidak selalu "cocok" dengan hadirnya nilai-nilai luhur masyarakat. Kondisi ini membutuhkan format pemberdayaan masyarakat dengan rangkaian sistematis dan berbasis kearifan lokal sebagai cita-cita luhur bangsa.

Vitasurya (2016), melakukan penelitian di Desa Wisata Kalibiru dan Lopati untuk menemukan variabel-variabel yang mendorong kesadaran masyarakat tentang wawasan lokal yang dipertahankan untuk menjaga iklim provinsi yang merupakan nama merek kota wisata. Tinjauan ini memanfaatkan investasi daerah setempat untuk memperoleh informasi yang bergantung pada inspirasi daerah

setempat. Persepsi oleh perencanaan dan pertemuan diarahkan untuk mengukur bagian-bagian dari perlindungan alam. Hasilnya diandalkan untuk menjadi model pelestarian kota industri wisata berbasis alam dengan dukungan penduduk sehingga cenderung dilakukan untuk kemajuan industri wisata negara di kemudian hari.

Yuliana *et al.* (2017) melaksanakan penelitian yang bertujuan mengungkap nilai-nilai kearifan lokal Ngata Toro, masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam mengelola hutan sebagai sumber belajar biologi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, non-observasi partisipan, studi dokumentasi, dan catatan lapangan. Data dianalisis dengan teknik triangulasi dengan menggunakan analisis interaksi kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan tampilan data. Masyarakat lokal Ngata Toro mengelola hutan dengan membagi hutan menjadi beberapa zona, yaitu *arewana ngkiki*, *wana*, *pangale*, *pahawa pongko*, *oma*, dan *balingkea*, disertai dengan aturan dalam pengelolaan konservasi hutan berbasis hasil dan pemanfaatan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi tujuan zonasi dan regulasi hutan, terungkap nilai-nilai seperti nilai konservasi lingkungan, nilai keseimbangan, nilai berkelanjutan, dan nilai kerja sama timbal balik. Nilai-nilai ini diimplementasikan sebagai sumber belajar biologis yang berasal dari standar kompetensi untuk menganalisis pemanfaatan dan konservasi lingkungan.

Fitriana dan Ridwan (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa budaya dan wawasan terdekat menjadi salah satu keputusan penting sebagai counter-culture. Kualitas dalam budaya lingkungan diciptakan, diselidiki, dan dipecah dalam berbagai sudut untuk diambil dan ditingkatkan sebagai jenis pekerjaan yang berkembang, bergantung pada kekuatan imajinatif tinggi dan kemajuan baru untuk memiliki opsi untuk membangun karakter publik yang dapat bersaing di seluruh dunia. Pemeriksaan ini menggabungkan penelitian perbaikan dengan metodologi ilustratif subjektif. Informasi dikumpulkan melalui persepsi, jajak

pendapat, dan pertemuan. Investigasi informasi menggunakan strategi pemeriksaan ilustratif untuk menggambarkan kemungkinan pengembangan ekowisata yang bergantung pada perusahaan imajinatif dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan di Kota Palangkaraya. Peningkatan ekonomi imajinatif di kawasan industri perjalanan tidak hanya masuk melalui sesuatu untuk dibeli, tetapi juga mulai menyelidiki sesuatu untuk dilakukan dan sesuatu untuk dilihat melalui paket kunjungan yang menawarkan wawasan langsung dan asosiasi dengan budaya lingkungan. Peningkatan ekonomi kreatif melalui paket industri perjalanan akan mendorong lokasi wisatawan untuk membuat barang-barang imajinatif yang akan memberikan manfaat dan keseriusan tambahan. Pencapaian peningkatan ekowisata tidak terlepas dari pekerjaan masyarakat sekitar itu sendiri, para pelaku usaha, dan bantuan dari pemerintah lingkungan sekitar.

Rangkuman hasil penelitian yang relevan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Peneliti dan Judul	Metode	Teori	Hasil	Keterangan
1.	Kongprasertamorn (2007) "Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand"	Kualitatif	Pemberdayaan komunitas	Penelitian ini berkonsentrasi pada kearifan lokal yang mengikat masyarakat untuk kelestarian alam meskipun setiap harinya dimanfaatkan. Kerang yang dikumpulkan bisa dibuat menjadi kerajinan untuk perlengkapan keseharian dan memenuhi kebutuhan hidup. Diperkirakan bahwa proyek-proyek ini akan mengarah pada manajemen sumber daya yang berkelanjutan.	Lokasi, pengumpulan kerang Provinsi Tambon Bangkhunsai Phetchaburi, Thailand
2.	Syaparuddin (2018) "Revitalizing Buginese Local Wisdom in the Development of Local Economy: Constructing Paradigm and Models Bugis, Makassar"	Studi literatur	Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Bugis yang mengekspresikan nilai ekonomi disebut <i>reso</i> (motivasi berprestasi). Nilai-nilai ekonomi yang dapat dinyatakan dari istilah <i>reso</i> adalah tauhid (keesaan Tuhan), keberanian, kerja keras, independen, menghormati waktu, serta etika dan moral. Paradigma yang dapat mengakomodasi nilai-nilai ini adalah paradigma humanis; maka paradigma ini direkonstruksi menjadi paradigma baru, yang disebut "Bugis Humanis", karena mengarah pada pandangan subjektif yang didasarkan pada kesadaran manusia, dan lebih menekankan nilai-nilai manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, model ekonomi lokal yang cocok untuk dikembangkan dari paradigma ini, "Bugis Humanis", adalah pembangunan manusia dan pertumbuhan dengan ekuitas.	Bidang ekonomi, tidak membahas pemberdayaan masyarakat Bugis, Makassar

3.	Bachrudin <i>et al.</i> (2018) "Community Empowerment in Planning Local Wisdom-Based Development"	Kualitatif	Pemberdayaan komunitas	<p>Hasil studi didasarkan pada evaluasi pemberdayaan Fujikake, yaitu masyarakat di Desa Tambakrejo memiliki kesadaran tinggi yang terbentuk dari keberadaan kearifan lokal dan kebijakan pemerintah sehingga pemberdayaan masyarakat dibuat yang berdampak pada banyak aspek untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, ditemukan juga bahwa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemiskinan, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya aspirasi sehingga tidak optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.</p>	Bidang pemancingan tradisional
4.	Diharto <i>et al.</i> (2018) "The Role of Community Based Tourism Based on Local Wisdom Using Online Media"	Kualitatif	Pemberdayaan komunitas	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat berbasis kearifan lokal menggunakan media <i>online</i> memiliki peran penting dalam keberhasilan pengelolaan ekowisata dalam rangka meningkatkan wisatawan lokal dan mancanegara.</p>	Bidang pariwisata dan media sosial, tidak membahas pemberdayaan masyarakat

5.	Salahuddin <i>et al.</i> (2018) "Local Wisdom as Social Capital of Gampong Development"	Kualitatif	Sosial	Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kearifan lokal dalam pembangunan Desa Leupung Baleu, Kecamatan Kuta Cot Gie, Kabupaten Aceh Besar, mencakup kolaborasi antarwarga yang telah berjalan baik dari generasi ke generasi, serta partisipasi yang kuat dalam pembangunan desa, serta selalu memprioritaskan musyawarah, terutama dalam kegiatan desa sebagai bagian dari kearifan lokal.	Bidang pembangunan desa, tidak ada pemberdayaan
6.	Ilhami dan Riandi (2018) "Conservation Based Local Wisdom in West Sumatera, Indonesia"	Kualitatif	Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat membuat bagian dari sungai sebagai ikan larangan dibagi ke dalam tiga zona dan daerah tersebut memiliki nilai konservasi, seperti perlindungan, pelestarian, dan penggunaan berkelanjutan.	Bidang lingkungan, tidak ada pemberdayaan masyarakat
7.	Humaida <i>et al.</i> (2018) "Characteristics of the Local Wisdom from South Borneo in Ecological Aspect"	Studi literatur	Pendidikan	Kearifan lokal Kalimantan Selatan dalam aspek ekologi menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan alamnya. Sumber daya alam yang diserap untuk memenuhi kebutuhan konsumerisme, kemajuan teknologi modern berikut terjadinya persaingan sosial ekonomi menjadi iklim tantangan bagi pembuat kebijakan dalam kerangka pembangunan berwawasan lingkungan.	Studi literatur, tidak ada pemberdayaan masyarakat

8.	Jufri <i>et al.</i> (2018) "The Potential of Local Wisdom on Traditional Fishing ( <i>Tangkal</i> ) Gear in Lake Sipin Jambi City as a Science Learning Source"	Kualitatif	Pendidikan	Tangkal adalah alat tangkap tradisional di Danau Sipin berupa jaring perangkap yang digantung menggunakan bambu. Mekanisme kerja tangkul menggunakan prinsip pesawat sederhana, yaitu jaring sebagai beban, tiang sebagai penopang, dan bambu sebagai lengan kekuatan dan lengan beban. Pada saat mengangkat jala, nelayan menarik tenaga dengan kekuatan otot lebih kecil daripada beban. Kompetensi dasar yang ditetapkan adalah di kelas VIII, yaitu, kompetensi dasar 3.3 Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia.	Bidang pendidikan, tidak ada pemberdayaan masyarakat
9.	Lisdiyono (2017) "Exploring the Strength of Local Wisdom in Efforts to Ensure the Environmental Sustainability"	Studi literatur	Lingkungan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kearifan lokal tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan memengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kekuatan pengetahuan lokal penting untuk dilestarikan dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan juga untuk melestarikan lingkungan.	Studi literatur, bidang lingkungan, tidak membahas pemberdayaan masyarakat
10.	Savira dan Tasrin (2017) "Involvement of Local Wisdom as a Value and an Instrument for Internalization of Public Service Innovation"	Kualitatif	Administrasi	Dengan menggunakan dan menginternalisasi nilai-nilai lokal, pemerintah daerah Kota Denpasar berhasil menciptakan inovasi layanan publik yang bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan kontekstual	Bidang layanan publik, tidak membahas pemberdayaan masyarakat

11.	Sungkharat <i>et al.</i> (2010) "Local Wisdom: The Development of Community Culture and Production Processes in Thailand"	Kualitatif	Ekonomi	Hasil studi mengungkapkan bahwa kearifan lokal dikuatkan oleh pemuka masyarakat untuk digunakan sebagai budaya yang terus dikembangkan pada proses produksi sebagaimana konsep swasembada dan kemandirian. Hasilnya, penduduk mengurangi konsumsi pupuk kimia, kembali berobat menggunakan bahan herbal sehingga ada penghematan biaya produksi dan mengurangi polusi	Lokasi, bidang pertanian
12.	Mungmachon (2012) "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure"	Kualitatif	Sosial	Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat terpengaruh oleh masuknya nilai nilai global yang berdampak pada eksploitasi alam, sehingga timbul masalah lingkungan karena hilangnya pengetahuan dan kearifan lokal. Makalah ini menyimpulkan ada upaya masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai luar yang berkesesuaian dengan budaya setempat untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan dampak lingkungan dan sosial yang positif.	Lokasi, tidak membahas pemberdayaan masyarakat
13.	Dahlhani <i>et al.</i> (2015) "Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era"	Kualitatif	Arsitektur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal tetap digunakan dalam visi pembangunan meski memasuki era globalisasi. Menjadi pertimbangan mendasar mengenai karakter lokal, iklim, dan kondisi alam yang dibangun.	Bidang arsitektur, tidak membahas pemberdayaan masyarakat

adalah jejaring dari komunitas sosial yang terbangun, baik dengan sesama keluarga, kerabat, handai tolan, sesama warga pulau/ RT/RW atau paguyuban di antara mereka. Kemampuan, keahlian nelayan dan jejaring hubungan sosial inilah yang dimaksud penulis modal sosial, sudah pemberian ada dimiliki oleh para nelayan tanpa menunggu bantuan dari orang lain.

Modal alam adalah ketersediaan sumber daya laut, yang di dalamnya banyak beraneka ragam jenis ikan, biota laut, keindahan bawah laut, keindahan panorama laut, pantai, gosong, dan hal-hal lain yang tidak ada di daratan yang bisa menarik dan laku untuk dijual, mulai sekadar untuk berfoto, berenang, snorkeling, menyelam, keliling antarpulau, hingga memancing. Sumber daya laut utamanya dimanfaatkan untuk menangkap ikan; menaruh rumpon; memasang bagang, bubu, dan keramba; serta membudidayakan ikan hias, ikan premium dan sebagainya, yang semuanya bisa dilakukan oleh para nelayan. Modal alam ini berlaku bagi siapa saja yang akan mengambil manfaatnya dengan mengikuti tata nilai, norma, dan aturan yang diberlakukan.

Kedua modal tersebut memperkuat kemandirian nelayan. Tanpa menunggu program pemerintah atau bantuan dana dari pihak lain, mereka para nelayan dapat melaksanakan aktivitas menjalani profesinya menghidupi keluarganya. Lebih lanjut, pemerintah berperan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat mulai dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai barang publik yang dapat digunakan secara umum untuk menunjang kehidupan masyarakat nelayan agar makin adil dan sejahtera. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut.

1. Menyediakan pelayanan listrik 24 jam, setelah sebelumnya listrik menyala hanya setengah hari. Saat ini sudah terbangun jaringan kabel bawah laut di beberapa pulau hunian. Sementara itu, di Pulau Sabira terbangun pembangkit listrik tenaga surya. Listrik 24 jam ini bersambut dengan layanan *cool storage* yang

dibangun oleh Sudin KPKP. Layanan ini sudah dapat beroperasi dan para nelayan bisa mengawetkan ikannya dalam *freezer*, menunggu pembeli yang biasa datang di musim liburan, Sabtu dan Minggu. Namun demikian, dengan makin berkembang dan banyaknya transportasi ke Pulau Seribu, sebenarnya para nelayan tidak kesulitan memasarkan ikan segar setiap saat.

2. Menyediakan rumah pendingin.
3. Menyediakan stasiun bahan bakar apung bersubsidi.
4. Menyediakan air bersih.
5. Menyediakan instalasi pengolahan limbah komunal (IPAL).
6. Menyediakan fasilitas pengelolaan sampah.
7. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.
8. Membangun sarana dan prasarana publik, berupa jalan, penerangan umum, rambu-rambu alat navigasi, fasilitas olahraga, dan sebagainya.
9. Memperindah lingkungan sehingga memunculkan spot wisata, terutama di lingkungan hunian, dan sarana pendukungnya.
10. Membangun agen sumber bahan pokok, Jakgrosir.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal alam berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan kelestarian alam melalui upaya konservasi, berakselerasi dengan upaya memperindah lingkungan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat nelayan berikut pranata sosialnya terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian, akan menumbuhkan banyak potensi objek wisata yang dapat menghibur para pengunjung dan wisatawan.

Interaksi masyarakat nelayan berikut pranata sosial/lembaga kemasyarakatan sebagai modal sosial, dengan sumber daya alam sebagai modal alam, dan layanan publik melalui peran unit kerja perangkat daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diatur

dalam mekanisme pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aturan tertulis, maupun aturan tidak tertulis tetapi disepakati bersama. Dengan demikian, hal tersebut menjadi norma yang ditegakkan bersama-sama dan menjadi nilai komunal yang berlaku sebagai kode etik yang berlangsung secara humanis dan universal. Pengaturan interaksi ini menjadi sistem perikehidupan yang berlaku dan dipedomani oleh semua pihak, baik masyarakat nelayan berikut pranata sosialnya, perangkat daerah/aparatur negara yang melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, pengunjung maupun wisatawan sehingga secara sistemik mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat lestari berkelanjutan (ekologik) ke segala aspeknya (holistik). Inilah yang dimaksud dengan model pemberdayaan masyarakat nelayan kemitraan sosial-ekologi, holistik, sistemik yang disingkat pemberdayaan masyarakat nelayan model KS-EHS.

Pada kemandirian nelayan model KS-EHS, interaksi fungsionalnya akan memunculkan alternatif mata pencaharian. Hubungan fungsional antara KS-EHS dengan konservasi, KS-EHS dengan perikanan, KS-EHS dengan pariwisata, dan KS-EHS dengan publik goods memunculkan alternatif mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengembangan Kepulauan Seribu berikut:

1. meningkatkan kualitas kehidupan nelayan;
2. meningkatkan kegiatan pariwisata; dan
3. pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove.

Alternatif mata pencaharian yang berpotensi tumbuh dalam hubungan fungsional antara masyarakat nelayan dan konservasi adalah sebagai berikut:

1. petugas penjaga zona konservasi;
2. petugas rehabilitasi mangrove dan terumbu karang; dan
3. petugas penerangan dan pengawasan zona konservasi.

Alternatif mata pencaharian yang berpotensi tumbuh dalam hubungan fungsional antara masyarakat nelayan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. nelayan penghasil ikan;
2. pengepul ikan segar;
3. pedagang ikan segar;
4. pedagang ikan bandeng cabut duri;
5. pengolahan ikan;
6. pedagang ikan asin;
7. pedagang peralatan menangkap ikan;
8. jasa pembuat rumpon;
9. pedagang pakan ikan;
10. distributor perangkat jaring apung;
11. pedagang ikan berkelas;
12. jasa pengiriman barang;
13. pedagang ikan karang atau ikan hias;
14. jasa pembuat akuarium atau pedagang akuarium;
15. petani rumput laut;
16. jasa pembuatan atau perbaikan kapal (*docking*);
17. budi daya ikan untuk kepentingan industri;
18. usaha bongkar muat kapal;
19. pembuatan peralatan khusus yang digunakan dalam kapal;
20. pedagang peralatan memancing dan peralatan melaut lainnya;
21. perajin jaring berbagai macam ukuran;
22. perajin bubu;
23. perajin keramba; dan
24. perajin perahu atau kapal.

Alternatif mata pencaharian yang berpotensi tumbuh dalam hubungan fungsional antara masyarakat nelayan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. *guide* (pemandu wisata)
2. *traveller*;
3. jasa ekspedisi, distributor;
4. jasa penyewaan (sepeda, *banana boat*, *diving*, snorkeling, perahu, dan alat pancing);
5. jasa penginapan, *homestay*, resor;
6. kuliner, pusat jajanan serbaikan, katering;
7. *handicraft* khas Kepulauan Seribu;
8. jasa transportasi antarpulau spot wisata;
9. wisata memancing;
10. wisata kuliner ikan hidup dan keramba; dan
11. jasa kamar mandi dan toilet umum.

Alternatif mata pencaharian yang berpotensi tumbuh dalam hubungan fungsional antara masyarakat nelayan dan *public goods* adalah sebagai berikut:

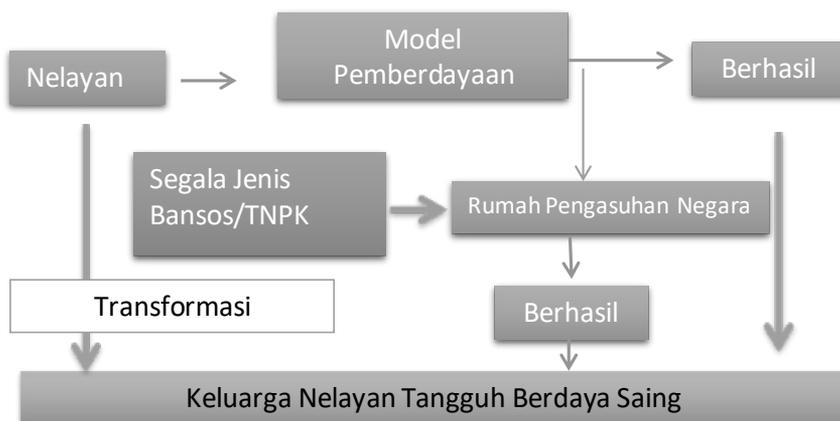
1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
2. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup;
3. PJLP Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP);
4. PJLP Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA);
5. PJLP Suku Dinas Unit Kerja Teknis 2 (Sudin UKT 2);
6. PJLP Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf);
7. PJLP Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans);
8. PJLP Dinas Sosial;

9. PJLP Dinas Perhubungan;
10. PJLP Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP);
11. PJLP Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
12. PJLP Kecamatan;
13. KKI Guru TK, SDN, SMPN, SMAN, dan SMK.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dilihat dari *survival* nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan modal kekuatan keahliannya, keluarganya, *skill*, pengalaman, saudara handai tolannya, komunitasnya, jejaring dan pergaulannya sebagai modal sosial serta dengan modal alam kelautan dan perikanan. Nyatanya, menurut hasil penelitian, mereka *survival*, tanpa harus mengeluarkan simpanan, kecuali kebutuhannya meningkat lagi. Situasi ini tidak masuk dalam konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nelayan melaut, yang cukup modal panen ikan, yang tidak cukup modal tidak panen ikan, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan hari-hari. Dunia kerja nelayan sangat luas dan tidak ada pengurangan tenaga kerja profesi nelayan. Justru dengan kehadiran nelayan, sumber daya kelautan berkembang menambah alternatif mata pencaharian. Dampak pengurangan tenaga kerja akibat Revolusi Industri 4.0 dan Covid-19 sebagaimana yang terjadi pada dunia industri, tidak terjadi pada lapangan kerja profesi nelayan. Hanya saja berpengaruh pada soal penghasilan yang menurun karena tingkat daya beli dan kunjungan wisatawan berkurang sampai nihil.

Sementara itu, profesi nelayan terbuka luas. Sumber daya kelautan dan perikanan masih menampung ribuan tenaga kerja, bergantung pada metode kerja yang dipakai. Tidak ada istilah tidak ada pekerjaan. Keadaan ini merupakan solusi untuk masalah ketenagakerjaan yang disebut bonus demografi tahun 2025, sebagai dampak ledakan jumlah penduduk. Dunia kerja itu ada dalam dunia maritim jika sumber daya kelautan dan perikanan, dikelola secara

sistemik-ekologik-holistik, dan dilandasi kuatnya sandaran vertikal, kuatnya iman dan takwa untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hidup adalah pilihan, sering sedekah tidak sama dengan boros, hidup sederhana bukan karena kemiskinan. Harkat dan martabat manusia sama di hadapan-Nya. Tidak ada lagi dikotomi kaya dan miskin, semuanya bergerak untuk kebajikan dan kebahagiaan. Modalnya ada dan lengkap dalam setiap orang, yaitu kesehatan lahir dan batin.



Sumber: Peneliti, dari Hasil Survei, 2021

**Gambar 3.80**

Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Sosial-Rumah Pengasuhan Negara (KS-RPN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi dan keadaan tertentu tidak semua orang atau orang tersebut dengan keluarganya bisa mengikuti pola peri kehidupan yang diterapkan sebagaimana model KS-EHS. Karenanya, mereka menjalani kehidupan tidak selayaknya. Penyebab keadaan ini antara lain faktor keturunan, musibah yang menghabiskan seluruh harta bendanya, fakir miskin, yatim piatu, sakit menahun atau sebab lain yang disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk memberikan kesempatan hidup layak kepada mereka, perlu intervensi pemerintah lebih intensif untuk golongan ini

dalam kaitannya dengan pemberdayaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Intervensi pemerintah yang dimaksudkan adalah dibangunnya Rumah Pengasuhan Negara (RPN) menampung seluruh PMKS. Fungsi RPN ini tidak sekadar menampung, tetapi memberikan pemberdayaan yang lebih intensif. Biaya hidup ditanggung oleh negara. Kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan latihan keterampilan dan keahlian sebagai modal kemandirian. Seluruh program pengentasan kemiskinan tercurah di sini. Penghuni RPN dikenalkan pada berbagai macam keterampilan menurut potensinya masing-masing, kerajinan, keahlian, kekuatan fisik, serta kekuatan mental dan spiritual. Pola pembinaan bertahap, bertingkat, berlanjut, tertib, terukur, berlaku ketat untuk pembinaan karakter dan semangat juang hidup layak. Pengaturan dilakukan dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan. Bagi yang sudah siap bekerja, RPN akan menyalurkannya. Kepercayaan terbangun melihat peran negara di belakangnya. Sampai mereka percaya diri terjun ke di tengah-tengah masyarakat setelah memiliki bekal cukup untuk mendapatkan kesejahteraan secara mandiri. Mereka keluar dari RPN. Bilamana mereka gagal, dapat kembali lagi ke RPN untuk dibina kembali.

Melalui tulisan ini, lokus Kepulauan Seribu sebagai representasi Kepulauan Nusantara, dapat memberikan daya ungkit nasional yang melimpah sumber daya alamnya, terus mengusahakannya secara ekologi-holistik-sistemik untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyatnya, dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia sebagai bangsa maju tanpa kemiskinan.



BAB IV

# PENUTUP



**F**enomena ketahanan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu pada masa pandemi Covid-19 dan Revolusi Industri 4.0, yang tetap melangsungkan kehidupannya dengan bergantung pada hasil laut dengan berprofesi sebagai nelayan, membuktikan bahwa kemandirian dimiliki oleh nelayan Kepulauan Seribu. Kemandirian nelayan ini bermodalkan budaya melaut yang mereka usahakan sebagai kearifan lokal turun-temurun dan ketersediaan sumber daya kelautan yang melimpah, baik di permukaan maupun dalam lautnya yang sangat luas manfaatnya bagi kehidupan manusia di segala bidang. Peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada para nelayan dengan layanan publik berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban, air bersih, listrik, *wifi* gratis, penanganan sampah dan pembuangan rumah tangga, transportasi, dan lainnya, mengikuti perkembangan kebutuhan publik masyarakat nelayan. Sekaligus dibutuhkan juga pengakuan kesetaraan profesi nelayan dengan mata pencaharian lain, yakni tetap dibanggakan, agar tetap ada dan lestari sebagai profesi sektor riil yang tetap berjalan beriringan dengan era digitalisasi (*internet of things*).

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan oleh perangkat daerah mencakup berbagai hal, antara lain program fasilitasi aktivitas nelayan dan pemberian bantuan serta pelatihan-pelatihan kepada keluarga nelayan menumbuhkan kewirausahaan dan penyediaan bantuan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan untuk memberikan proteksi kepada nelayan berupa pendampingan kewirausahaan melalui Jakpreneur, yang memberikan akses pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan untuk dipasarkan melalui jejaring sosial dan interaksi sosial. Dukungan UKPD dalam bentuk pendampingan wirausaha melalui Jakpreneur kepada masyarakat nelayan Kepulauan Seribu, terutama ibu rumah tangga nelayan, dilakukan oleh Sudin KPKP, Sudin PPKUKM, Sudin Parekraf, Sudin Nakertrans, dan Sudin PPAPP. Pendaftaran

dilakukan secara *online* melalui Jaki. Pelatihan *online* mencakup materi kewirausahaan, pendampingan pembukuan, sampai dengan perizinan.

Upaya pemberdayaan lainnya dilakukan dengan memberikan akses pemasaran, antara lain, melalui kemitraan dengan Tokopedia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan setiap hari Jumat belanja UKM binaan Jakpreneur melalui gerakan Jumat Beli Lokal (JBL). Selain itu, akses pemasaran UKM binaan Jakpreneur dikaitkan dengan perjanjian kinerja UKPD, yakni diberikan target capaian e-Order, dengan cara belanja makan minum dari produk UKM yang di-*input* ke dalam e-Order oleh pendamping Jakpreneur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pertamina mengupayakan kesetaraan harga BBM untuk para nelayan di Kepulauan Seribu melalui SPBU apung. SPBU apung hadir di perairan Pulau Panggang dan Pulau Pramuka dengan harga BBM yang sama dengan harga standar di daratan Jakarta.

Proteksi kesehatan nelayan dilaksanakan melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui BP Jamsostek. Kemudahan nelayan untuk mengakses kepesertaan BP Jamsostek untuk jaminan keselamatan kerja maupun tunjangan hari tua diberikan melalui kebijakan pendaftaran mekanisme khusus yang disebut Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), yaitu bentuk layanan BP Jamsostek untuk mendekatkan diri kepada pesertanya dengan melibatkan pengurus masyarakat setempat setelah melalui pelatihan yang diadakan oleh BP Jamsostek.

Apresiasi kepada nelayan diberikan melalui tatap muka. Mereka berdialog langsung dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Bupati yang hadir guna mendengarkan secara langsung keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan, di samping mendengarkan keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dalam kebijakannya sudah berjalan, tetapi beberapa minggu belakangan

sudah tidak sesuai lagi atau tidak berjalan seperti biasanya. Misalnya, keluh kesah masyarakat nelayan Pulau Sabira kepada Gubernur DKI pada kesempatan tatap muka tanggal 30 April 2020. Ada keluhan mengenai transportasi kapal Dishub yang sudah tidak ada lagi, dengan alasan kekurangan penumpang, sementara di pulau yang lain sudah bolak-balik mengangkut penumpang. Waktu itu, menurut info Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), ada kapal yang masih di *docking*, sehingga Pak Gubernur meminta Kadishub untuk segera kembali melayani setelah selesai *docking*. Pada akhir acara perwakilan Ketua RT, Ketua RW, dan LMK yang juga seorang nelayan, mendapat kehormatan menerima topi dinas gubernur berlambang padi dan kapas karena berhasil membawa masyarakatnya, yang sebagian besar merupakan nelayan, menjadi masyarakat tangguh dan mandiri. Pak Gubernur berpesan untuk melanjutkan kemandirian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyokong dengan pemenuhan layanan publik agar bisa dinikmati secara adil dan merata. Atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tokoh nelayan Pulau Sabira Ibu Hj. Sri Hartuti terpilih sebagai nomine Ibu Ibukota Awards atas keberhasilannya merintis permukiman Pulau Sabira dari kali pertama dihuni masyarakat sampai sekarang. Penghargaan langsung diberikan oleh Ibu Ferry Farhaty, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta,.

Selanjutnya, nelayan diingatkan akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan kehidupan bersama alam, dengan mengagendakan penanaman mangrove, pelepasan tukik, penanaman pohon kelapa, serta penanaman pohon produktif setiap kali kunjungan kerja Gubernur, Bupati maupun pimpinan UKPD. Pesannya adalah melestarikan ekologi Kepulauan Seribu.

Upaya selanjutnya adalah menetapkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum, yang

selanjutnya disebut KPU; Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut KK; dan Alur Laut yang selanjutnya disebut AL. Kemudian, diturunkan lagi zona yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik ekologis setiap pulau. Zonasi yang sudah ditetapkan difungsikan sebagaimana yang ditetapkan, serta dijaga dan diamankan oleh petugas. Lebih lanjut, zonasi tersebut disosialisasikan kepada warga masyarakat dan pengunjung agar mereka turut melestarikan dan memelihara ekologi setiap pulau sesuai dengan karakteristiknya. Peran pemerintah secara sistemik adalah mengatur *user* dan *owner* secara keseluruhan serta berbuat nyata untuk kemandirian para nelayan secara terintegrasi dan holistik.

Selanjutnya, dapat diuraikan mengenai nilai-nilai penyebab kemandirian nelayan yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, kebebasan menghamba (*freedom to servitude*) dan kerelaan bekerja keras untuk menafkahi keluarga bernilai ibadah kepada Allah Swt. yang telah memberikan amanat keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menafkahi, sehingga kerja keras mereka tersebut termasuk aktivitas takwa. Selanjutnya adalah harga diri (*self esteem*) yang muncul dari kemandirian bersama perusahaan alam untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, mereka dapat merekrut tenaga kerja, menjadi manajer atau pimpinan perusahaan yang terus memanen ikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem hayati dan berkelanjutan. Terakhir adalah keberlanjutan, yakni upaya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara baik, pengendalian diri, dan bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup generasi berikutnya yang juga membutuhkan alam bersama ekosistemnya oleh semua pihak dalam berbagai aktivitas.

Telah disusun model pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, yang didapatkan dari pengembangan model kemitraan-sosial-*ecocentrism*. Modelnya adalah pola perusahaan

yang dilakukan oleh “nelayan sukses” dengan menggunakan modal alam dan modal sosial sebagai kearifan lokal secara turun-temurun yang menjadi mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat nelayan secara keseluruhan (holistik), terarah secara sistemik, dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan (ekologik). Untuk itu, perangkat daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik dalam hal layanan administrasi, barang publik, maupun sarana dan prasarana publik sebagaimana kewenangan dan tugas fungsi yang diemban oleh unit kerjanya, sehingga keadilan sosial akan tercapai dengan model pemberdayaan ini. Lebih lanjut, model pemberdayaan yang dihasilkan dalam penelitian ini berakselerasi dengan sektor lain, berpotensi menciptakan alternatif mata pencaharian baru yang nantinya menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak Revolusi Industri 4.0 maupun akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat nelayan masih mendapatkan pekerjaannya sebagai nelayan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup hari-hari. Hal ini karena sudut pandang modal alam dan modal sosial diletakkan dalam mimbar utama penelitian, berkesinambungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah dalam koridor sistemik-ekologik-holistik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan saran akademik sebagai berikut. Pertama, penelitian selanjutnya perlu menganalisis lebih mendalam kreativitas masyarakat dalam menyiasati persoalan hidup yang dapat diselesaikan secara baik dengan tetap berwawasan lingkungan dan ini menjadi seni jalan hidup orang tertentu yang dapat digeneralisasi sebagai pengetahuan yang berasal dari produk budaya yang berlaku umum dan universal.

Kemudian, penelitian selanjutnya perlu meningkatkan keterlibatan warga yang sukses modal alam dan modal sosial sebagai informan agar kemampuan masyarakat dalam hal menjalani kehidupan lebih menonjol, sehingga ke depannya peran pemerintah

tidak lagi pada upaya pemberdayaan, tetapi kemitraan sosial dalam mencapai kebahagiaan bersama yang adil dan sejahtera.

Model pemberdayaan yang diajukan oleh penulis ini kiranya layak menjadi referensi dalam menjadikan kearifan lokal dan modal alam sebagai rujukan lapangan kerja yang nyata dan menyejahterakan.

Selanjutnya, saran praktis yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut. Pertama, perangkat daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu membuat perumusan kerja pengaturan personel dengan beban tugas dan kewajiban berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk terus mengondisikan keberlangsungan sendi-sendi kehidupan di wilayah kerja Kepulauan Seribu secara sistemik-ekologik-holistik.

Kemudian, perangkat daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, pengolahan limbah, penanganan sampah untuk menciptakan lingkungan perairan dan kepulauan yang bersih, indah, lestari, dan berkelanjutan.

Terakhir, perangkat daerah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun pemerintah daerah lainnya, serta pemerintah pusat kiranya layak menggunakan model pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal, modal sosial, dan modal alam sebagai kemandirian alami yang ditopang dengan layanan publik pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan barang publik (*public goods*). Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada kepada warga yang benar-benar lemah agar mereka tinggal di rumah negara, digembleng serta digodok dengan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya. Seluruh program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan berpadu di rumah negara sehingga tidak ada lagi warga negara yang telantar atau tercecer di jalan-jalan. Rumah negara justru

mencetak tenaga kerja andal secara moral spiritual dengan bekal keterampilan maupun keahlian sehingga siap berkompetisi dengan dunia masyarakat umum dan selanjutnya mereka bisa mendapatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dengan demikian, sampailah pada suatu keadaan tidak ada lagi orang telantar, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi ketidakberdayaan, dan yang ada adalah usaha yang dilandasi niat tulus menunaikan kewajiban menafkahi anak istri dengan rezeki halal sebagai hamba Allah Swt., bersyukur atas kecukupan rezeki, berlomba-lomba berbuat kebajikan, sehingga akan menghadirkan kembali keindahan negeri, *gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

## GLOSARIUM

**Aksesibilitas:** semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

**Amenitas:** fasilitas yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, rumah makan dan sarana olahraga serta lainnya yang disediakan bagi wisatawan.

**Ancillary:** dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata.

**Aplikasi JAKI (Jakarta Kini):** aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfotik DKI Jakarta yang mengintegrasikan informasi dari berbagai SKPD sebagai bentuk layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat Jakarta.

**Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA):** unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam.

**Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS):** lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

**Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah

**Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

**Birokrasi:** suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

**Desentralisasi:** penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah agar lebih optimal untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

**Dynamic governance:** tata kelola pemerintahan yang dinamis adalah hasil peningkatan kapasitas untuk pembangunan jalur yang adaptif (*adaptive path*) dan kebijakan yang adaptif (*adaptive policy*) sehingga dihasilkan eksekusi pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang efektif. Penjelasan lain dari *dynamic governance* adalah institusionalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung kemampuan organisasi yang proaktif untuk menghasilkan jalur-jalur yang adaptif (*adaptive path*).

**Ekologi pemerintahan:** studi ilmiah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internalnya, maupun lingkungan eksternalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat, prosesnya, serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia.

**Ekologi:** ilmu tentang lingkungan yang hidup, tumbuh dan berkembang dari biologi yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan beradaptasi dengan dengan perubahan lingkungan.

**Fish shelter:** benda padat buatan manusia yang di rancang dan ditenggelamkan di perairan sebagai tempat perlindungan dan berkumpulnya ikan di dalam atau di sekitar struktur tersebut, fish shelter sering juga disebut sebagai terumbu buatan.

**Gotong royong:** salah satu budaya khas Indonesia hasil warisan masa lalu yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dalam bentuk kerja Bersama-sama.

**Inovasi:** proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan.

**Jakpreneur:** platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti startup, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan.

**Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN):** kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

**Kearifan lokal:** kebijaksanaan atau pengetahuan asli yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

**Kelompok Usaha Bersama (KUBE):** wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri.

**Kemiskinan:** keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

**Keramba jaring apung (KJA):** salah satu wadah budi daya perairan yang cukup ideal, yang ditempatkan di badan air dalam, seperti waduk, rawa, danau, dan laut.

**Ketahanan Pangan:** kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

**Kewenangan:** kekuasaan yang sah, yang diberikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kontrak Kerja Individu (KKI):** Guru: kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merekrut tenaga honorer di bidang pendidikan (guru TK, SD, SMP, SMA).

**Modal alam:** adalah istilah yang digunakan terutama oleh para ekonom ekologi, yang merupakan jenis yang relatif baru, untuk memajukan pemahaman kita tentang pembangunan berkelanjutan.

**Modal sosial:** istilah yang digunakan oleh ekonom progresif dan ilmuwan sosial lainnya untuk memajukan pemahaman kita tentang masyarakat dan komunitas

**Model KS-EHS:** model pemberdayaan masyarakat nelayan dengan kemitraan sosial secara ekologis, holistik, dan sistemik.

**Model:** penyederhanaan kandungan maksud mewakili gejala-gejala dan fenomena-fenomenanya dunia nyata, menggunakan parameter-parameter dan variable-variabel tertentu punya pengaruh dominan dari sebuah objek, proses, peristiwa, situasi dan sistem; representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu yang bermanfaat untuk menjelaskan persoalan yang kompleks melalui penyederhanaan dalam bentuk skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

**Nelayan *babang*:** adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan jauh ke tengah laut, memerlukan waktu beberapa hari melaut, tidak pulang-pulang, membawa bekal secukupnya dengan harapan membawa hasil tangkapan melimpah.

**Nelayan:** istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan

***Ngeramban*:** pekerjaan nelayan menyusuri perairan dangkal pada sore hari, mengambil hasil laut yang bisa digunakan untuk kebutuhan pangan, misalnya teripang dan kerang mata tujuh.

***Ngobor*:** Teknik untuk mendapatkan ikan dengan hanya memanfaatkan lampu petromaks sebagai alat penerangan dan tombak yang sering dikerjakan oleh para nelayan di Kepulauan Seribu.

***Ngoyok*:** cara mendapatkan biota laut dengan cara 'memancing, berendam atau berjalan-jalan di air dilakukan pada saat air surut, yaitu pada kedalaman hanya semata kaki sampai sepusar.

**NVivo:** aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan serta analisis terhadap data kualitatif yang mana selama ini dalam penelitian kualitatif jarang menggunakan sistem otomasi analisis data kualitatif.

**Organisasi:** sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu

**Otonomi daerah:** Kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat

**Urusan pemerintahan:** fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

**Partisipasi masyarakat:** kontribusi sekarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan

**Pelayanan publik:** upaya pemenuhan kebutuhan publik berupa barang publik, jasa publik aau pelayanan administratif dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat

**Pemandu wisata (*guide*):** sosok yang merupakan perantara antara wisatawan dengan pihak *tour and travel*; tugas seorang pemandu wisata adalah bertanggung jawab pada perjalanan wisata dan membawa suasana yang menyenangkan.

**Pembangunan berkelanjutan:** upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

**Pembangunan:** proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

**Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB):** pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya.

**Pemberdayaan masyarakat:** proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

**Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM):** kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

**Pemerintah Daerah:** otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**Pemerintahan Daerah:** penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *pemerintah daerah* dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas.

**Pemerintahan:** Semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

**Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT):** kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya.

**Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP):** orang perorangan yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui penyedia orang perorangan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi.

**Perubahan sosial:** bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah.

**Pok DPL-BM:** Kelompok Nelayan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat; kelompok yang membantu dalam sosialisasi dan turut mengamankan pemanfaatan laut Kepulauan Seribu sesuai dengan zonasinya.

**Pokdakan:** kumpulan pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

**Poklasar:** kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

**Pokmaswas:** kelompok pengawas masyarakat adalah kelompok nelayan yang menjadi mitra KPKP mengawasi sumber daya ikan, memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran di perairan Kepulauan Seribu, dalam penangkapan ikan maupun perusakan karang.

**PPSU:** petugas yang membantu menyelesaikan masalah atau merawat sarana dan prasarana yang terdapat di tingkat kelurahan Provisi DKI Jakarta.

**Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K):** rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Revolusi Industri 4.0:** upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, yang semua proses produksinya berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

**Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):** tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak.

**Rumpon:** rumah ikan atau tempat berkumpulnya ikan di dasar laut

**Strategi:** bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh.

**Sudin KPKP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:** unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**Sudin PPKUKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:** unit kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*):** tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

**Wirausaha baru:** wirausaha pemula yang telah mendaftarkan dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja.

**Wirausaha naik kelas:** orang perseorangan atau kelompok orang yang sudah memulai usaha, menjalani usaha dan/atau ingin mengembangkan usaha dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kecil menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Wirausaha pemula:** perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha.



# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Ali, Fahried dkk. 2015. *Filsafat & Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Almutahar, Hasan. 2013. *Pembangunan Masyarakat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Anas, Abdullah Azwar. 2020. *Creative Collaboration*. Bandung: Expose.
- BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 2020. *Kabupaten Kepulauan Seribu dalam Angka 2020*. Jakarta: Dharmaputra.
- Cansil, CST. 2000. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazinul Ulum, Mochamad dan Niken Lastiti Veri Anggaini. 2019. *Community Empowerment*. Malang: UB Press.
- Chhotray, Vasudha dan Gerry Stoker. 2009. *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
- Djaenuri, Aries. *Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Buku Materi Pokok.
- Djaenuri, H.M. Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djohan, Djohermansyah dkk. 2016. *Menelisik Sisi Pelik Desentralisasi dan Praktik Pilkada*. Jakarta: i-Otda.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prasta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung: Indra Prahasta.
- Guy, James John. 1998. *People, Politics, and Government: Canadian Perspective*. Scarborough, Ont.: Prentice Hall.

- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Erliana. 2011. *Filosafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Erliana. 2014. *Komunikasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hoogerweri, A. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Imron, Masyhuri (ed.). 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengelolaan Sumberdaya Laut secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Iver, Mc. 1985. *Jaring-Jaring Pemerintahan*. Terjemahan Drs. Laila Hasyim. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jeddawi, Murtir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2018. *The Great Shifting, Series on Disruption: Ketika Platform Berubah, Kehidupan dan Bisnis Pun Berpindah, Lebih Baik Pegang Kendali daripada Dikuasai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Korten, David C. 2001. *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global, Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LKIS.

- Labolo, Muhadam dkk (ed.). 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan (Kompilasi Hasil Seminar, Makalah, dan Jurnal Ilmu Pemerintahan)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maknun, Djohar, 2017. *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem, Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Mardikanto, Totok dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Masyhuri. 1999. "Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural", dalam Masyhuri (ed.). *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap sebuah Pendekatan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Mayer, Robert R dan Ernest Greenwood. 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-38. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Narbuko dan Achmadi, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, WL. 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi ke-5. Boston: Pearson Education.
- Pamudji, S.1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, M. Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasif Watampone.

- \_\_\_\_\_. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Daya Widya.
- Rianto, Adi, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ristono, A. 2011. *Pemodelan Sistem*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S. Hubeis, Aida Vitalyala. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Sahri, Muhammad. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Model Kemitraan Socio-Ecocentrisme, Agar Masyarakat Pesisir Menjadi Kreatif dan Inovatif*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, Brian C. 2012. *Desentralisasi Dimensi Teritorial Negara*. Terjemahan Tim MIPI. Jakarta: MIPI.
- Soesilo, Nining I. 2000. *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik I*. Jakarta: UI.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik II*. Jakarta: UI.
- Soetomo. 2013. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, Loekman. 1995. "Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan", dalam Awan Setya Dewanta dkk. (ed.). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, Ahmad. 2016. *Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipasi Masyarakat di Pinggiran dan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhartini, RR dkk. 2015. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Putra Karya.

- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Supriyatna, Tjahya. 2016. *Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: IPDN Press.
- Suradinata, Ernaya. 2016. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Suradinata, Ernaya. 2018. *Etika Pemerintahan Geopolitik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Era Globalisasi*. Bandung: Ramadan.
- Tunas, Billy. 2007. *Memahami dan Memecahkan Masalah dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Nimas Multima.
- Usman, Suyanto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik sampai ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Edisi revisi yang diperluas. Jatinangor: IPDN Press.
- Wasistiono, Sadu dan Petrus Poliyando. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: IPDN Press.
- Watloly, Aholib. 2013. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa, Perspektif Indigenous Orang Maluku*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara.

## B. Jurnal

- Bachrudin, Sholahuddin, A., dan Rozikin, Z. 2018. "Community Empowerment in Planning Local Wisdom-Based Development". *International Journal of Humanities, Religion and Social Science* Volume 2, Issue 12, December 2018.
- Bhandari, Humnath dan Kumi Yasunobu. 2009. "What is Social Capital? A Comprehensive Review of the Concept". *Asian Journal of Social Science*, Volume 37, Number 3, 2009: 480–510.
- Dahlioni, Ispurwono Soemarno, dan Purwanita Setijanti. 2015. "Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era". *International Journal of Education and Research*, Vol. 3 No. 6 June 2015.
- Damanik, Adlin. 2019. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah". *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2019.
- Diharto, Awan Kostrad dkk. 2018. "The Role of Community Based Tourism Based on Local Wisdom Using Online Media". *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Volume 9, Issue 2, February 2018: 908–915.
- Fitriana, Evi., dan M. Khoiri Ridlwan. 2017. "Pengembangan Ekowisata Berbasis Industri Kreatif Berwawasan Kearifan Lokal di Palangkaraya". *Proceeding of Community Development*, Vol. 1 (2017).
- Ghoni, Abdul. 2016. "Community Empowerment Based on Local Wisdom (Study of Globalization's Idea in Community Empowerment)". *Hikmatuna*, Vol. 2 No. 1, April 2016.
- Humaida, Nida., Virginia Maria Louisa, dan Nana Citrawati Lestari. 2018. "Characteristics of the Local Wisdom from South Borneo in Ecological Aspect". *Environmental Science and Engineering (ESE) International Journal*, Volume 1 No. 2, October 2018: 30–34.
- Ilhami, Aldeva dan Riandi. 2018. "Conservation Based Local Wisdom in West Sumatera, Indonesia". *IJSSHE-International Journal of*

- Social Sciences, Humanities and Education*, Volume 2, Number 2, 2018.
- Imron, Masyhuri. 2003. "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5.1 (2003): 63–82 <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/259/237/503>.
- Jufrida, Fibrika Rahmat Basuki, dan Dwi Risky Pratiwi. 2018. "The Potential of Local Wisdom on Traditional Fishing (Tangkal) Gear in Lake Sipin Jambi City as a Science Learning Source". *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains* (2018), Vol 7(2): 146–158.
- Java, East, and East Java. "Wisdom-Based Development". 2.12 (2018): 65–74.
- Klarin, Tomislav. 2018. The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 21, No. 1: 67–94.
- Korten, David C., 'Renewing the American Experiment'. *Tikkun*, 20.1 (2005), 40–43 <https://doi.org/10.1215/08879982-2005-1018>.
- Kongprasertamorn, Kamonthip. 2007. "Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand". *Manusya: Journal of Humanities* 10.1, 2007.
- "Kabupaten Kepulauan Seribu" <<https://pulauseribu.jakarta.go.id/post/9963/Kabupaten-Kepulauan-Seribu-Dukung-Peningkatan-Pelayanan-BPJS-Kesehatan>> [Diakses 19 Maret 2022].
- Latopa, Abdul-Lateef Ayinde dan Saidu Mohammed Bashir. 2015. "Analysis of Values and Principles of Community Development: a Response to The Challenges of Building a New Nigeria". *The 7th Annual National Conference of the College of Administrative Studies and Social Sciences (C.A.S.S.S.)*, Kaduna Polytechnic.
- Lisdiyono, Edy. 2017. "Exploring the Strength of Local Wisdom in Efforts to Ensure the Environmental Sustainability". 2017. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Volume 8, Issue 11, November 2017: 340–347.

- Mawardi, Ikhwanuddin. 2012. "Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *JRL*. Vol. 8 No. 1, Maret 2011: 1–10.
- Mungmachon, Roikhwanphut. 2012. "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 13, July 2012.
- Pesurnay, Althien John. 2017. "Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia". *Conference Paper* July 2017. <https://www.researchgate.net/publication/322437084> diunduh pada tanggal 10 Maret 2020.
- Roseland, Mark. 2000. "Sustainable Community Development: Integrating Environmental, Economic, and Social Objectives". *Progress in Planning* 54 (2000): 73–132.
- Salahuddin, Budi Siswanto dan Sri Hartini Djatmikowati. 2018. "Local Wisdom as Social Capital of Gampong Development". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Volume 23, Issue 8, Ver. 7 (August. 2018): 77–84.
- Savira, Evi Maya dan Krismiyati Tasrin. 2017. "Involvement of Local Wisdom as a Value and an Instrument for Internalization of Public Service Innovation". *International Journal of Administrative Science & Organization*, January 2017, Volume 24, Number 1.
- Schutte, De Wet. 2016. "Community Development and Community Participation: a Conceptual Revisit". Working Paper September 2016. <https://www.researchgate.net/publication/307560360> diunduh pada tanggal 08 Maret 2020.
- Sungkharat, Utit dkk. 2010. "Local Wisdom: The Development of Community Culture and Production Processes in Thailand". *International Business & Economics Research Journal* – November 2010, Volume 9, Number 11.

- Syaparuddin. 2018. "Revitalizing Buginese Local Wisdom in the Development of Local Economy: Constructing Paradigm and Models". *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175 (2018) 012142.
- Sartini, Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati". *Jurnal Filsafat*, Vol 14, No 2 (2004): 111–120.
- Triyanty, Riesti dan Maulana Firdaus, 2016. "Welfare Level of Small Scale Fisher Based on Sustainable Livelihood Approach in Indramayu District". *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6 Juni 2016 : 30–33.
- Vitasurya, Vincentia Reni. 2016. "Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta" *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 216 ( 2016 ): 97–108.
- Yuliana, Siti Sriyati dan Yayan Sanjaya. 2017. "Local Wisdom of Ngata Toro Community in Utilizing Forest Resources as a Learning Source of Biology". *AIP Conference Proceedings* 1868, 100007 (2017).

### **C. Regulasi Pemerintah**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.
- Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

# INDEKS

## A

ability 79, 81, 333  
 adaptive policy 50, 314, 333  
 agility 81, 333  
 agraris 333  
 aksesibilitas 333  
 alophyllum inophyllum 333  
 amandemen 333  
 amenitas 333  
 ancillary 333  
 antropologi 45, 82, 333  
 aplikasi 35, 75, 234, 247, 251,  
 263, 265, 266, 267, 284,  
 288, 313, 317, 333  
 Aquathlon 134, 333  
 Artocarpus atilis 108, 333  
 ASOCA 81, 333  
 atmosfer 3, 77, 270, 333  
 authority 47, 333

## B

Barringtonia asiatica 108, 333  
 Bazar Along Market 217, 333  
 biosfer 77, 293, 333  
 Brugiera sp 109, 333  
 bupati 56, 87, 333

## C

cases 251, 252, 253, 334  
 Casuarina equisetifolia 109, 334  
 Cerbena adollam 109, 334  
 Chelonia mydas 187, 334

civil disobedience 47, 334  
 Cocos nucifera 108, 334  
 coding 36, 253, 334  
 community 37, 59, 65, 74, 334  
 community-based development  
 65, 334  
 community development 65,  
 74, 334  
 consume 334  
 consumer control 47, 334  
 Covid-19 6, 7, 8, 16, 17, 18, 38,  
 39, 44, 97, 125, 126, 127,  
 128, 129, 156, 213, 218,  
 235, 236, 246, 260, 301,  
 306, 310, 318, 334  
 culture 26, 37, 81, 334

## D

Das Sein 15, 16, 334  
 Das Sollen 15, 16, 334  
 demografi 6, 86, 278, 301, 334  
 desa 21, 30, 34, 48, 56, 66, 223,  
 263, 283, 334  
 deskriptif 23, 67, 334  
 destinasi 34, 88, 95, 113, 133,  
 134, 149, 165, 172, 221, 262,  
 263, 282, 283, 313, 334  
 development 37, 53, 65, 74,  
 291, 334  
 digital 8, 38, 51, 136, 222, 267,  
 334

distrik 56, 334  
docking 206, 207, 216, 299,  
308, 334  
dynamic governance 50, 314,  
334

## E

ekologi 18, 22, 31, 60, 62, 63,  
76, 109, 293, 294, 298, 309,  
316, 335  
ekologik 235, 246, 281, 290,  
293, 294, 298, 302, 303,  
310, 311, 316, 335  
ekosistem 15, 63, 75, 77, 106,  
192, 199, 203, 281, 291,  
293, 294, 297, 298, 308,  
309, 315, 335  
ekowisata 19, 20, 21, 27, 30,  
153, 335  
eksperimental 335  
eksternalitas 48, 335  
empowering 65, 335  
empowerment 37, 53, 72, 335  
entitas 79, 84, 219, 335  
equal role 290, 291, 335  
Eretmochelys imbricate 187,  
335  
ethical conduct 74, 335  
etika 20, 28, 81, 335  
etnisitas 46, 335  
evaluator 58, 335

## F

falsafah 54, 59, 236, 335  
festival 124, 203, 335

finansial 9, 41, 47, 335  
fish shelter 11, 191, 192, 193,  
203, 314, 335  
fixed cost 48, 335  
framework 71, 335, 338  
freedom 3, 70, 309, 335  
freedom to servitude 70, 309,  
335  
freezer 11, 210, 267, 297, 336  
Fujikake 20, 29, 336

## G

Garuda 54, 336  
geopolitik 54, 336  
globalisasi 24, 25, 33, 50, 336  
gotong royong 336  
grounded research 336

## H

habitat 74, 192, 336  
heptagon asset 336  
Hibicus tiliaceus 109, 336  
holistik 45, 51, 60, 62, 63, 71,  
83, 110, 235, 246, 281, 290,  
293, 294, 298, 302, 303,  
309, 310, 311, 316, 336  
homestay 125, 134, 208, 257,  
259, 282, 300, 336  
Homestay 222, 336  
humanis 20, 28, 45, 79, 298,  
336  
Humanis 20, 28, 29, 336

## I

ideologi 54, 336  
independen 20, 28, 336

- indigenous perspective 109, 336
- inovasi 23, 24, 25, 32, 51, 59, 149, 262, 294, 336
- interaksi 26, 66, 68, 69, 78, 148, 149, 238, 293, 298, 307, 336
- internet of things 8, 38, 306, 336
- J**
- Jakpreneur 217, 229, 231, 232, 233, 263, 264, 265, 266, 267, 306, 307, 315, 337
- justifikator 58, 337
- K**
- kabupaten 5, 40, 48, 49, 55, 56, 86, 90, 112, 116, 158, 220, 221, 232, 337
- kearifan lokal 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 49, 51, 54, 58, 81, 82, 83, 84, 86, 234, 239, 248, 253, 261, 284, 287, 290, 291, 292, 294, 301, 306, 310, 311, 312, 337
- kecamatan 5, 48, 56, 87, 90, 91, 112, 116, 240, 263, 337
- kelurahan 48, 56, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 111, 112, 116, 128, 141, 148, 156, 169, 193, 204, 209, 240, 244, 283, 320, 337
- kolaborasi 21, 30, 83, 125, 217, 263, 264, 291, 294, 315, 337
- komitmen 46, 67, 68, 337
- komorbid 125, 127, 337
- komuni 337
- komunikator 57, 337
- komunitas 22, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 83, 109, 246, 290, 291, 293, 294, 296, 316, 337
- konflik 52, 75, 220, 337
- konkuren 58, 337
- kota 2, 4, 5, 6, 25, 26, 39, 40, 48, 49, 50, 55, 56, 76, 86, 87, 125, 128, 149, 152, 168, 221, 232, 240, 249, 271, 272, 282, 285, 337, 342
- kualitatif 20, 21, 23, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 317, 337
- kuantitatif 64, 337
- kuliner 117, 118, 119, 120, 121, 133, 162, 163, 165, 257, 258, 300, 337
- L**
- layanan sipil 337
- legislatif 55, 56, 68, 337
- life sustenance 3, 337
- local wisdom 35, 81, 109, 338
- logical thinking framework 338
- M**
- makrokosmos 45, 240, 338
- maritim 246, 302, 338
- market failure 48, 338
- metodologi 27, 338

- milenium 75, 338  
 millennial 338  
 mobilisator 57, 338  
 mobilization 71, 338  
 modal alam 8, 9, 35, 39, 40, 41,  
     76, 77, 234, 235, 247, 253,  
     261, 262, 269, 279, 281,  
     284, 290, 292, 297, 301,  
     310, 311, 312, 338  
 modal sosial 8, 21, 35, 39, 40,  
     41, 50, 51, 76, 78, 79, 80,  
     81, 234, 235, 237, 238, 241,  
     247, 253, 261, 278, 279, 281,  
     284, 286, 290, 292, 296, 297,  
     301, 310, 311, 312, 338  
 model 12, 13, 19, 20, 23, 26, 29,  
     34, 39, 40, 50, 253, 261, 267,  
     290, 291, 292, 293, 294, 295,  
     298, 302, 310, 312, 316, 338  
 moral 20, 28, 37, 80, 83, 148,  
     238, 246, 312, 338  
 Morinda citrifolia 108, 338  
 motivation 73, 338  
 multidimensi 45, 78, 338  
 museum 94, 338  
 muson 102, 286, 338  
**N**  
 natural capital 76, 338  
 natural monopoly 48, 338  
 nelayan 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
     23, 31, 38, 39, 40, 41, 67, 86,  
     91, 95, 96, 104, 111, 116,  
     117, 121, 122, 123, 129, 130,  
     135, 142, 144, 162, 163, 166,  
     168, 170, 173, 176, 185, 188,  
     189, 190, 193, 194, 195, 196,  
     199, 201, 206, 209, 210, 216,  
     217, 227, 232, 233, 235, 236,  
     237, 238, 242, 243, 244, 245,  
     246, 248, 249, 251, 252, 253,  
     254, 256, 257, 258, 259, 260,  
     261, 262, 263, 266, 267, 268,  
     269, 270, 274, 275, 276, 278,  
     279, 281, 282, 284, 285,  
     286, 287, 288, 289, 290,  
     291, 292, 293, 294, 295, 296,  
     297, 298, 299, 300, 301, 306,  
     307, 308, 309, 310, 312,  
     316, 317, 319, 338, 339  
 nelayan babang 123, 135, 339  
 new world order 44, 339  
 ngeramban 123, 339  
 ngobor 122, 339  
 ngoyok 122, 339  
 Nodes 339  
 non excludability 339  
 non rivalry 339  
 norma 44, 54, 59, 78, 79, 81,  
     236, 238, 240, 296, 298, 339  
 NVivo 35, 36, 245, 247, 251,  
     254, 317, 339  
**O**  
 Oceanic Folk 135, 339  
 opportunities 81, 339  
 Opportunities 339

otonom 40, 55, 58, 285, 339

ozon 77, 339

## **P**

paceklik 286, 339

Pancasila 54, 236, 323, 339

Pandanus sp 109, 339

Pandanus tectorius 108, 339

pandemi 6, 7, 16, 17, 18, 38, 39,  
87, 96, 97, 116, 124, 125,  
142, 163, 213, 214, 218, 235,  
236, 246, 256, 260, 261, 282,  
292, 306, 310, 318, 339

participation 72, 339

participatory 339

partnership 72, 290, 339

Pasopati 218, 219, 340

Pemphis acidula 108, 340

pentagon asset 340

People-centered 340

people-oriented 71, 340

philosophische grondslag 340

pluralisme 46, 340

pokdakan 340

poklasar 340

pokmaswas 340

politik 46, 60, 61, 63, 66, 68, 78,  
220, 225, 318, 340

polutan 77, 340

PPSU 5, 16, 38, 141, 173, 260,  
269, 300, 320, 340

public goods 39, 48, 300, 312,  
340

public service 53, 340

public utility 39, 340

pure public goods 48, 340

## **R**

religius 57, 291, 340

republik 44, 340

res-cogintans 80, 340

res-extansa 80, 340

reso 19, 20, 28, 340

resort 340

Revolusi Industri 4.0 7, 8, 16,  
18, 38, 39, 235, 244, 278,  
292, 301, 306, 310, 320, 340

rumpon 11, 193, 197, 200, 206,  
267, 296, 299, 341

## **S**

self esteem 3, 309, 341

Sistemik 293, 341

social capital 76, 341

social distancing 7, 341

Social justice 341

socio-ecosentrisme 341

socio-epistemologi 341

solidaritas 21, 67, 341

sosial distancing 292, 341

sosial-ekonomi 61, 62, 63, 341

Sosiologi 323, 327, 341

sovereign 46, 341

spesies 74, 106, 107, 108, 341

Strategi 94, 320, 326, 327, 341

strength 81, 341

Strength 32, 330, 341

survai 341

Sustainability 32, 330, 341

sustainable 65, 341

SWOT 81, 341

## **T**

tangkul 22, 23, 31, 341

tauhid 20, 28, 341

Terminalia catappa 108, 342

thinking across 50, 342

thinking ahead 50, 342

threats 81, 342

top-bottom 68, 342

tradisional 22, 23, 25, 29, 31,  
34, 62, 64, 66, 121, 124, 143,  
218, 219, 342

transcendental 342

## **V**

values 37, 342

variable 316, 342

## **W**

wali kota 56, 342

way of perception 57, 342

weakness 342

wirusaha baru 263, 267, 342

wirusaha naik kelas 230, 342

wirusaha pemula 230, 321,  
342

wisdom 35, 37, 81, 109, 338,  
342

world class government 50, 342

## **Z**

zonasi 26, 86, 108, 160, 198,  
251, 293, 309, 342

## TENTANG PENULIS

**Dr. Purnomo, A.P., M.Si.** dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 1976. Menamatkan SDN Kabat III pada tahun 1988, menyelesaikan pendidikan di SMPN Kabat pada tahun 1991 dan SMAN 2 Banyuwangi pada tahun 1994. Mendapat gelar ahli pemerintahan (A.P.) dari Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), mendapat gelar magister sains (M.Si.) dari Program MPKP FE Universitas Indonesia pada tahun 2003, dan pada tahun 2021 memperoleh gelar doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Beberapa posisi dalam jajaran birokrasi yang pernah penulis duduki antara lain Staf Kecamatan Cilincing; Staf Kepegawaian Kodya Jakarta Utara (1998–1999); Staf Khusus Sekodya Jakarta Utara (1999–2001); Sekel Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (2001–2002); Wakil Lurah Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (2002–2007); Lurah Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara (2007–2011); Lurah Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara (2011–2013); Lurah Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara (2013–2014); Lurah Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara (2014–2016); Camat Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara (2016–2019); serta Kabag Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Administrasi Jakarta Kepulauan Seribu (2019 sampai dengan sekarang).

**Dr. M. Irwan Tahir, A.P., M.Si.** lahir Bantaeng pada tahun 1974. Menyelesaikan jenjang Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Pamong Praja Muda pada tahun 1997 dengan gelar ahli pemerintahan. Pada tahun 2000 melanjutkan studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama dan selesai pada tahun 2003.

Di sela-sela kesibukan sebagai tenaga pengajar di almamaternya Institut Pemerintahan Dalam Negeri, penulis melanjutkan kuliah di Program Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjadjaran yang dirampungkan pada tahun 2015.

Sebagai abdi negara, selepas pendidikan dari Lembah Manglayang, Jatinangor, pengabdianya dimulai di tanah Maluku yakni pada Bappeda Provinsi Maluku pada tahun 1997. Setahun kemudian, pada tahun 1998 mendapat penugasan pada Pemerintah Kota Ambon, tepatnya pada Sub Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Kantor Camat Nusaniwe. Pengabdian di Kota Ambon berakhir pada tahun 2000 seiring dengan mutasi kembali ke STPDN/IPDN. Beberapa penugasan di STPDN/IPDN yang pernah dijalani oleh penulis adalah sebagai Pengasuh Praja (2000–2003), Staf Litbang (2003–2006), Dosen/Tenaga Pengajar (2007–sekarang). Ditugaskan sebagai Sekretaris Prodi S-1 Kebijakan Pemerintahan (2009–2011), Sekretaris Prodi D-IV Pembangunan dan Pemberdayaan (2012–2014) Sekretaris Prodi DIV Politik Pemerintahan (2014–2016), Sekretaris Program S-2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (2016–2018) dan Ketua Prodi Magister Terapan Studi Pemerintahan (2018–2020).

Selain sebagai dosen tetap pada IPDN dengan jabatan fungsional lektor kepala, penulis juga aktif sebagai ketua Lembaga Pengkajian Kepemerintahan dan Pelayanan Publik (LPKPP), pembina Yayasan Mudawwamatul Taqwa Al-Marwani Tasikmalaya, serta sebagai asesor kompetensi pada LSP Penulis dan Editor Profesional.

Beberapa karya tulis telah penulis terbitkan dalam bentuk buku antara lain Prospek Pengembangan Desa (Penulis Bersama, Fokusmedia, 2006), Administrasi Pemerintahan Desa (Penulis Bersama, UT, 2011), Mendesain Organisasi Perangkat Daerah (IPDN, 2014).